

**SEKULARISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAOED JOESOEF TAHUN
1978-1983 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP UMAT ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Program Srata Satu (S-1)

Pada Prodi Sejarah Peradaban Islam (SPI)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Ablyyu Riwanto

NIM: A02218003

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ablyyu Riwanto

Nim : A02218003

Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Alamat : Jl. Ketintang 2/12 – Surabaya

Dengan sungguh-sungguh saya menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang terdapat sumber-sumbernya. Jika ternyata pada kemudian hari SKRIPSI ini terbukti bukan merupakan hasil karya saya sendiri, saya bersedia untuk mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 3 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Ablyyu Riwanto

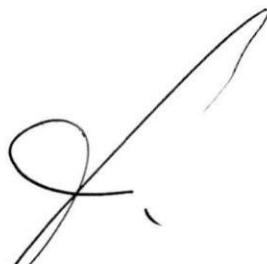
Nim. A02218003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Tanggal 3 Oktober 2022

Pembimbing 1



Drs. H. M. Ridwan., M. Ag

NIP.195907171987031001

Pembimbing 2



I'in Nur Zulaili, M.A.

NIP.199503292020122027

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini ditulis oleh Ablyyu Riwanto (A02218003) dengan judul “SEKULARISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAOED JOESOEF TAHUN 1978-1983 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP UMAT ISLAM” “telah diujikan oleh tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Oktober 2022

Ketua/Penguji I



Drs. Ridwan Abu Bakar, M.Ag.

NIP. 195907171987031001

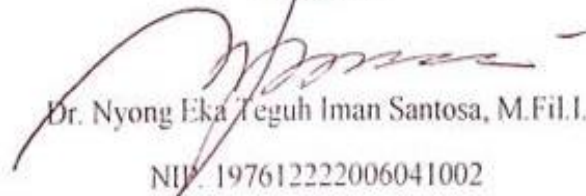
Penguji II



Fin Nur Zulaili, M.A.

NIP. 199503292020122027

Penguji III



Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fil.I.

NIP. 197612222006041002

Penguji IV



Dr. Imam Ibnu Hajar, M.Ag.

NIP. 196808062000031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya



Mohammad Kurjum, M.Ag

NIP. 196909251994031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “SEKULARISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAOED JOESOEF TAHUN 1978-1983 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP UMAT ISLAM” mempunyai tiga fokus bahasan penelitian yakni (1) biografi dari menteri pendidikan dan kebudayaan pada tahun 1978-1983 yaitu bapak Daoed Joesoef (2) kebijakan-kebijakan yang dinilai mencerminkan sekularisasi pada pemerintahan menteri pendidikan dan kebudayaan yaitu bapak Daoed Joesoef (3) dampak yang dialami oleh segenap umat Islam atas dikeluarkannya sebuah kebijakan yang dinilai sekuler oleh menteri pendidikan dan kebudayaan yaitu bapak Daoed Joesoef.

Teknik penulisan pada penelitian ini menggunakan *library research* dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang menerapkan empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam pendekatan terhadap penulisan ini sendiri yaitu melalui pendekatan historis, ilmu politik, dan sosiologis yang digunakan untuk mengungkapkan gejala-gejala pada peristiwa masa lampau beserta dampaknya bagi masyarakat. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dan dampak sosial yang memfokuskan kepenulisan ini mengenai kebijakan yang dikeluarkan beserta dampaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa (1) masa kecil dan pendidikan, jenjang karir Menteri Pendidikan Daoed Joesoef, pemikiran Daoed Joesoef terhadap pendidikan dan kebudayaan (2) perubahan hari libur selama bulan ramadhan, pelarangan berhijab bagi para siswi yang beragama Islam (3) dampak yang dialami umat muslim atas kebijakan libur pada bulan ramadhan, dampak kebijakan pelarangan berhijab bagi umat muslim.

Kata Kunci: Daoed Joesoef, Sekularisasi, Kebijakan

ABSTRACT

The thesis entitled "SECULARISATION OF DAOED JOESOEF EDUCATION POLICIES IN 1978-1983 AND THEIR IMPACT ON ISLAMIC ATTITUDES" has three research focuses, namely (1) biography of the minister of education and culture in 1978-1983, namely Mr. Daoed Joesoef (2) policies that considered to reflect secularization in the government of the minister of education and culture, namely Mr. Daoed Joesoef (3) the impact experienced by all Muslims on the issuance of a policy that was considered secular by the minister of education and culture, namely Mr. Daoed Joesoef.

The writing technique in this study uses library research by using the research method used is the historical research method that applies four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The approach to this writing itself is through historical, political, and sociological approaches that are used to reveal the symptoms of past events and their impact on society. Meanwhile, the theory used in this research is the theory of public policy and social impact which focuses on this writing regarding the policies issued and their impacts.

Based on the results of the research that has been done, it can be seen that (1) childhood and education, career path of the Minister of Education Daoed Joesoef, Daoed Joesoef's thoughts on education and culture (2) changes in holidays during the month of Ramadan, prohibition of wearing the hijab for Muslim students (3) the impact experienced by Muslims on policies holidays in the month of Ramadan, the impact of the policy of prohibiting the hijab for Muslims.

Keywords: Mr. Daoed Joesoef, Secularization, Policy

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Pendekatan dan Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II BIOGRAFI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAOED JOESOEF 1978-1983	23
A. Masa Kecil dan Pendidikan	23
B. Jenjang Karir Menteri Pendidikan Daoed Joesoef.....	29
C. Pemikiran Daoed Joesoef Terhadap Pendidikan dan Kebudayaan.....	32
BAB III KEBIJAKAN-KENIJAKAN SEKULER PADA MASA PEMERINTAHAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAOED JOESOEF	49
A. Perubahan Hari Libur Selama Bulan Ramadhan	49
B. Pelarangan Hijab Bagi Para Siswi Muslim.....	54
BAB IVDAMPAK BAGI UMAT ISLAM ATAS KEBIJAKAN SEKULER MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAOED JOESOEF.....	59

A. Dampak Dari Kebijakan Libur Pada Bulan Ramadhan	59
B. Dampak Dari Kebijakan Pelarangan Berjilbab Bagi Umat Muslim...	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sketsa Candi Borobudur.....48



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang perjalanan sejarah kehidupan, manusia selalu dimasukan kedalam isu-isu terhadap perubahan-perubahan, karena ingin tampil dalam kondisi yang berbeda dan lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Dengan berpegang sebuah perbandingan antara kehidupan masa lalu dengan kehidupann sekarang serta kehidupan orang-orang yang lebih baik dalam melihat sebuah aspek yang berunsur realitas dan materi. Bahwasanya semua orang sangatlah ingin tampil untuk lebih maju serta lebih modern, walaupun ukuran dan tata nilai yang digunakan dalam perbandingan yang telah dibandingkan sering juga hal tersebut menjadi kabur, namun karena adanya suatu isu yang akan dikembangkan adalah ingin menjadilebih baik dan maju bahkan modern, menjadisebuah sesuatu tersebut dapat untuk dibangga-banggakan.¹

Kondisi tersebut telah mendorong sebagian darikelompok manusia melakukan berbagai macam upaya agar menjadikan mereka sebagai orang-orang yang termasuk golongan maju dan modern, mereka juga mendobrak nilai-nilai sosial serta budaya yang telah baku dan menjadi sebuah eksistensi pada masyarakat, mereka sendiri sangat berani mengkritik apapun yang dianggap sebagai pengahalang dari sebuah kemajuan dan kebebasan terhadap umat manusia. mereka sendiri menganggap bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia hanya ditentukan serta diatur oleh manusia itu sendiri,

¹ Adian Husaini, *Islam Libera*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2008), 15.

bukan berdasarkan atas pengaruh dari dogma agama, sehingga muncullah sebuah wacana yang diistilahkan sebagai bentuk dari Sekularisme, yakni sebuah pemisahan antara urusan dunia “Negara” serta urusan dalam agama.²

Pada kasus yang terdapat pada negara Indonesia, beberapa sebulan menjelang kemerdekaan, embrio terhadap dasar negara yaitu “Pancasila” dipertemukan, diperdebatkan dan di sepakati sebagai *way of life* atau ideologi nasional,³ meskipun dengan berbagai pertimbangan tertentu.⁴ Pada kenyataan negara Indonesia yang didasarkan atas Pancasila yang dirumuskan oleh para *founding fathers* yang ada di negeri ini khususnya bapak Ir. Soekarno yang menyatakan bahwa dasar negara Pancasila tidak didasarkan atas agama atau dengan pola salah satu agama. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi terhadap pengaruh sekularisme dan sekaligus sebagai bagian dari bentuk sekularisasi yang menempatkan sebuah agama pada suatu posisi yang bersifat pariferal.⁵

Sekularisasi sendiri dapat dipahami dengan cara sederhana sebagai bagian dari sebuah proses yang mengarah kepada sebuah pengingkaran terhadap adikodrati atau sesuatu yang bersifat transenden. Salah satu aspek yang

² Deka Kurniawan, *Melengserkan Agama Dari Urusan Publik* (Surabaya: Hidayatullah Press, 2005), 54.

³ Andree Fellard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian isi, Bentuk dan Makna, Terj Lesmana* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 31.

⁴ Pertimbangan-pertimbangan yang dimaksudkan tersebut adalah karena hal tersebut merupakan sebagai wujud untuk mempercepat proses kemerdekaan Republik Indonesia beserta UUD 1945 yang pada awalnya bersifat sementara. Namun kenyataan lainnya adalah mayoritas dari penduduk bangsa Indonesia memeluk Islam sebagai agama, namun disamping hal tersebut tidak dinaifkan terdapat juga penganut agama lain yang juga ikut berperan dalam proses meraih kemerdekaan bangsa. Oleh karenanya Ir. Soekarno menyatakan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan juga sebagai negara agama, akan tetapi sebagai negara Pancasila.

⁵ Bachtiar Effendy, *Teologi Politik Baru Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 81.

menjadi sebuah ciri khas dari bentuk Sekularisasi itu sendiri adalah pemisahan antara sebuah urusan yang bersifat duniawi dan sebuah urusan yang bersifat ukhrowi, dalam hal ini merupakan bentuk pemisahan antara urusan agama dan negara yang di klaim oleh sebagian orang. Dari sisi pihak yang berhubungan dengan agama Islam, sebuah proses sekularisasi dipahami sebagai bentuk proses dari rasionalisasi atau desakralisasi terkait dengan objek-objek yang tersakralkan. Hal tersebut juga disebabkan karena bagian dari sebuah proses perjalanan sejarah, maka dalam bidang agama Islam sendiri terjadi yang dalam istilahnya sendiri “*taqdiisu al afkaaru al diniyyah*”.⁶ Membicarakan terkait dengan proses sekularisasi di tanah air sendiri sebenarnya sudah ada sejak pra kemerdekaan yang dapat dilihat dari pemikiran sang proklamator yakni Ir. Soekarno yang sangat mengagung-agungkan Attaturk.⁷

Pada masa pemerintahan Orde Baru, umat Islam sendiri mendapatkan banyak mendapatkan perhatian dari para pengamat politik maupun pengamat sosial. Karena hubungan antara pemerintahan Orde Baru dengan umat Islam pada saat itu sendiri mengalami kondisi yang bisa dibilang pasang surut, karena pada awal mulanya hubungan tersebut diawali karena adanya kerja sama antara kedua belah pihak, kemudian disusul dengan timbulnya ketegangan serta konflik yang berakhir dengan saling mengakomodasi antara satu sama lain.

⁶ Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *slam dan Sekularisme*, terj. Karsidjo Djojokuswarno (Bandung: Penerbit Pustaka, 1981), 24.

⁷ Kamal Attaturk ketika pada tahun 1924 telah berhasil mendirikan negara yang berbentuk sekuler dan juga sekaligus menghapuskan sistem kekhalifahan “Turki Utsmani” yang dianggap sebagai bentuk representasi kekuasaan politik Islam. Dan juga pada tahun 1928 terjadi proses penghapusan simbol keislaman dari undang-undang Turki, yaitu penghapusan simbol pengakuan “Islam sebagai Agama Negara”.

Sementara kerja sama yang dibangun antara pemerintahan orde baru dengan umat Islam sendiri berlandaskan atas sebuah kepentingan bersama, yakni dalam rangka untuk menjatuhkan rezim Orde Lama yang sedang berkuasa beserta Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta segala unsur-unsurnya.

Pemerintahan pada masa Orde Baru sendiri dipimpin oleh presiden Soeharto dan berhasil memantapkan kedudukannya dalam pentas politik yang sudah dirancangnya dengan baik, dalam hal tersebut sangatlah berdampak dengan hubungan antara umat Islam dengan pemerintahan Orde Baru menjadi memburuk. Presiden Soeharto beserta dengan para pejabatnya ketika itu lebih melihat umat Islam sebagai ancaman terhadap kestabilan politik dan pembangunan. Ketegangan yang terjadi antara umat Islam dengan pemerintahan pada masa Orde Baru terjadi begitu lama antara tahun 1967-1980 an yang membuat pemerintahan Orde Baru mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap sangat berdampak serta merugikan bagi umat Islam.⁸

Salah satu kebijakan yang dianggap sebagai awal terjadinya konfrontasi antara pemerintahan masa Orde Baru dan Umat Islam adalah salah satunya terbit dari kementerian pendidikan dan kebudayaan pada masa periode Menteri Daoed Joesoef. Pada masa tersebut kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menetapkan aturan pemerintah yang melarang para siswi yang bersekolah di sekolahan negeri untuk memakai hijab, tidak hanya itu menteri Doed Joesoef juga telah menetapkan kebijakan untuk tidak meliburkan siswa dan siswi pada

⁸ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 25.

saat bulan Ramadhan. Hal ini dikarenakan latar belakang dari sosok Daed Joesoef sendiri yang menempuh pendidikan di Univesity Sorbonne, Paris, Prancis.⁹ Dimana sebuah universitas dan negara tersebut juga memiliki pengaruh sekularisme yang cukup kuat karena negara Prancis sendiri juga salah satu negara yang melopori revolusi industri dan berdirinya sebuah negara sekuler.

Dalam hal merespon atas kebijakan-kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru yang dinilai telah memojokan umat Islam, umat Islam sendiri meresponnya dengan cara konfrontatif, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan hubungan di antara keduanya menjadi memburuk. Titik balik atas kejadian tersebut adalah berpacu pada bergulirnya gagasan Pancasila yang digunakan sebagai asas tunggal pada tahun 1982. Dengan adanya sebuah gagasan tersebut menimbulkan sebuah aksi pro serta kontra karena ada yang mendukung maupun yang menolak dari berbagai organisasi masa “Ormas Islam”. Namun, pada saat pemerintahan Orde Baru benar-benar untuk menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1985, mayoritas dari ormas Islam yang ada di Indonesia mulai untuk menerimanya dan terjadilah akomodasi antara pemerintah dengan umat Islam. Sebuah penelitian yang terkait dengan sekularisasi kebijakan masih minim sekali. Rata-rata kepenulisan tentang sekularisasi sendiri berkaitan dengan ilmu pengetahuan bukan berkaitan dengan suatu kebijakan. Namun, sisi menarik yang dapat

⁹ Daed Joesoef, *Emak Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne* (Jakarta: Kompas, 2005).

digali adalah sebuah kebijakan sendiri haruslah berlandaskan atau berlatar belakang sebuah kajian, yang dimana melakukan suatu kajian tersebut juga berbekal ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sangat lah langka jika di negara yang majemuk seperti Indonesia ini terdapat sesuatu kebijakan yang dinilai sekuler.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka telah diketahui rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Biografi Menteri Pendidikan dan Budaya Daoed Joesoef ?
2. Bagaimana Kebijakan-Kebijakan Sekuler Pada Masa Pemerintahan Menteri Pendidikan dan Budaya Daoed Joesoef ?
3. Bagaimana Dampak Bagi Umat Islam Atas Kebijakan Sekuler Menteri Pendidikan dan Budaya Daoed Joesoef?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis ini pasti akan memiliki sebuah tujuan ataupun maksud yang diharapkan oleh penulis, adapun tujuan dari penelitian ini ditulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Biografi Menteri Pendidikan dan Budaya Daoed Joesoef.
2. Untuk Mengetahui Kebijakan-Kebijakan Sekuler Pada Masa Pemerintahan Menteri Pendidikan dan Budaya Daoed Joesoef.
3. Untuk Mengetahui Dampak Bagi Umat Islam Atas Kebijakan Sekuler Menteri Pendidikan dan Budaya Daoed Joesoef.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai bagian dari tugas akhir, penulis sendiri sangat mengharapkan agar karya yang sudah diselesaikan dengan sedemikian rupa ini agar bisa bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang hendak membacanya serta bisa juga untuk mengetahui bagaimana pada zaman Orde Baru terdapat sebuah kebijakan yang kontroversial bagi dunia pendidikan pada masa tersebut yang tentunya sangat berdampak bagi para pelajar secara keseluruhan serta pelajar yang beragama Islam. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis manfaat dari ditulisnya penelitian ini yaitu, antara lain:
 - a. Dalam hal ini, penulis sangat mengharapkan bagi pembacanya agar bisa menambah khazanah keilmuan terkait dengan sejarah pada bidang pendidikan di Indonesia.
 - b. Penulis juga sangat mengharapkan, bahwa kelak hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan para intelektual-intelektual muda dalam mengembangkan bidang keilmuan, khususnya terkait dengan perkembangan pendidikan di Indonesia.
2. Secara Pragmatis manfaat dari ditulisnya penelitian ini yaitu, antara lain:
 - a. Hasil dari tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi seseorang yang membacanya dan juga diharapkan bisa bermanfaat bagi semua kalangan di dunia pendidikan.

- b. Dapat juga dijadikan sebagai bahan ataupun sumber referensi bagi masyarakat yang hendak meneliti perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia.
- c. Hasil dari tulisan ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ataupun bahan bacaan bagi penelitian yang lebih lanjut, sehingga dapat menghasilkan kajian dengan lingkup yang lebih luas lagi dan berkembang ke beberapa aspek dalam keilmuan.

E. Pendekatan dan Kerangka Teori

Pendekatan sendiri menurut KBBI merupakan sebagian dari usaha dalam rangka pendukung terhadap aktivitas penelitian yang berguna untuk menghubungkan terhadap subjek yang akan diteliti, serta metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁰ Dalam penelitian tentang “Dampak Kebijakan Sekularisasi Pendidikan Masa Daed Joesoef Tahun 1978-1983 Terhadap Umat Islam” ini menggunakan pendekatan historis, ilmu politik serta sosiologis. Dimana dengan menggunakan sebuah pendekatan tersebut diharapkan bisa menghasilkan sebuah penjelasan yang dapat untuk mengungkapkan gejala-gejala terhadap sebuah peristiwa masa lampau yang sudah berlangsung serta dampak-dampak yang terjadi pada masyarakat dalam aspek sosiologis terutama kepada umat Islam yang diwakili oleh beberapa ormas Islam.

Teori adalah sebuah sistem atau konsep yang mengindikasikan adanya sebuah hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang dapat membantu

¹⁰ Margareth M Polomo, *Sosiologi Kontemporer, Terj. Yasogam* (Jakarta: Rajawali, 1984), 23.

kita guna untuk memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan ide-ide yang digunakan untuk membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi.¹¹ Jadi sebuah teori berfungsi untuk mentransformasikan atau dapat mengadakan sebuah perubahan hubungan antara hukum dan fakta, serta berperan untuk membantu mendapatkan sebuah pengertian hingga mengikhtisarkan informal sehingga kegiatan-kegiatan seperti penafsiran, penilaian dan pernyataan dapat dilaksanakan dengan mudah yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah pemahaman baru mengenai sesuatu.¹²

Dalam penelitian ini menggunakan teori Sekularisme yang merupakan sebuah konsep atau ideologi bahwasanya harus ada pemisah antara agama dengan pemerintahan, hal tersebut dapat berupa mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum agama dengan hukum sipil dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil atas dasar agama. Sedangkan menurut August Comte, telah mengatakan bahwa sebuah kegiatan sekularisasi merupakan sebuah akibat dari adanya sebuah proses modernisasi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari beberapa negara maju seperti Inggris, Jerman dan Prancis, di negara-negara yang dicantumkan tersebut telah terjadi sebuah penyusutan pengunjung di Gereja secara signifikan sejak tahun 1960 hingga sekarang ini. dapat dilihat juga pada zaman yang sangat modern ini, banyak

¹¹ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisa dan Aplikasi Edisi ke 3* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 49.

¹² Hari Wahyono, *Makna dan Fungsi Teori Dalam Proses Berfikir Ilmiah dan Dalam Proses Penelitian Bahasa* (FKIP Universitas Tidar Magelang) 23, no. 1 (n.d.): 203-211.

orang yang mengaku beriman namun tanpa melakukan tindakan amal. Modernisasi ini juga meliputi perubahan yang terjadi pada masyarakat yang dahulunya merupakan masyarakat agraris kini berpindah ke industry, dari pedesaan menjadi perkotaan, dari kebiadaban menjadi sebuah peradaban, hal ini berlangsung seterusnya, karena proses tersebut sering disebut sebagai modernisasi yang menyebabkan munculnya sekularisasi di Barat.¹³

Dalam penelitian ini juga menggunakan teori mengenai kebijakan publik. Pengertian teori kebijakan publik menurut A. Hoogerwert merupakan unsur penting atas politik, serta dapat diartikan juga sebagai tindakan guna untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan tertentu menurut waktu yang telah ditentukan. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah hubungan antara unit-unit dari pemerintahan beserta dengan lingkungannya. Menurut Gaston bahwasanya kebijakan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di setiap tingkatan pemerintahan yang berguna untuk memecahkan masalah publik.¹⁴

Selanjutnya, proses-proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi setiap isu-isu kebijakan publik.
2. Mengembangkan proposal kebijakan publik.
3. Melakukan tindakan advokasi terhadap kebijakan publik.
4. Melaksanakan kebijakan publik.

¹³ M. Syukri smail, "Kritik Terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Al Qardhawi)." *Kontekstualita* (STAI YASNI Muara Bungo) 29, no. 1 (2014): 107.

¹⁴ Bambang Margono, Dkk. *Pembaharuan Perlindungan Hukum* (Jakarta: Inti Ilmu, 2003), 6.

5. Mengevaluasi setiap kebijakan publik yang telah atau usai dilaksanakan.

Menurut para ahli tentang persoalan kebijakan publik ini merupakan sebuah kegiatan pemerintah yang harus diikuti oleh semua masyarakat, baik pemerintah tersebut melakukan sebuah kegiatan atau tidak melakukan kegiatan. Kebijakan sendiri merupakan sebuah upaya untuk memahami serta mengartikan suatu masalah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya untuk mengentaskan masalah tersebut beserta penyebabnya dan pengaruh atas kebijakan publik tersebut. Para ahli juga memberikan penjelasan bahwasanya kebijakan publik adalah sebuah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan yang akan dianggap membawa dampak bagi kehidupan masyarakat.¹⁵

Pada penelitian ini juga memakai sebuah teori dampak sosial. Pengertian dari kata dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang akan mendatangkan sebuah akibat, baik itu akibat yang bersifat positif ataupun negatif.¹⁶ Dampak jika dijelaskan secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh ataupun akibat. Dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh seorang atasan biasanya akan membuat dampak yang tersendiri, baik itu dampak yang bersifat positif ataupun dampak yang bersifat negatif. Kemudian arti dari sosial itu sendiri adalah merupakan bagian tidak utuh atas setiap hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas segala hal yang bersifat rapuh didalamnya. Sedangkan

¹⁵ ¹⁵ William N Dunn, *Public Policy Analysis : An ntroduction Terj. SIPOL* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 98.

¹⁶ Suharno Retnoningsih dan Ana. *Kamus Besar Bahasa ndonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002), 243.

dampak sosial merupakan pengaruh atas suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan sebuah perubahan bagi lingkungan sosial serta keadaan sosial.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang lainnya terkait dengan sekularisasi ataupun tentang sebuah kebijakan yang kontroversial sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan” yang ditulis oleh Amalia Sholihat pada tahun 2020 program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Persamaan topik pembahasan pada skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang persoalan kebijakan yang dikeluarkan Menteri pendidikan pada masa itu yaitu Daoed Joesef. Serta perbedaan pada penelitian terdahulu terjadi perbedaan dalam pembahasan objeknya, karena membahas tentang kebijakan libur pada bulan Ramadhan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan-kebijakan yang di nilai sekuler.¹⁸
2. Jurnal MIQOT Vol. XI No. 2 tahun 2016 dengan judul “Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam dan Pendidikan Sekuler” yang ditulis oleh Hasbullah Hadi Dkk. dipublikasikan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor. Persamaan topik

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 374.

¹⁸ Amalia Sholihat, *Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan* (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Sejarah), 2020.

pembahasan pada penulisan tersebut adalah sama-sama membahas persoalan kebijakan pada bidang pendidikan. Namun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis adalah penelitian terdahulu tersebut dibedakan antara kebijakan pendidikan yang berbasis Islam dengan model pendidikan yang berbasis sekuler pada kalangan masyarakat.¹⁹

3. Adapun penelitian terdahulu yang membahas terkait kebijakan dari Menteri Daoed Joesoef sendiri adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Salsabila Ramadhani dari Universitas Negeri Surabaya jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan judul “Kebijakan Jilbab di SMA Pada Masa Daoed Joesoef (Penerapan Di Surabaya Tahun 1982-1991)” yang dibuat pada tahun 2018. Persamaan yang ditulis pada topik penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Daoed Joesoef selama menjabat sebagai seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal yang membedakan pada pembahasan tersebut adalah nilai-nilai sekularisasi pada kebijakan yang dinilai sangat jauh dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam.²⁰

G. Metode Penelitian

¹⁹ Hasbullah Hadi, *Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam dan Pendidikan Sekuler* (Jurnal MIQOT) Vol. 40, No. 2, 2016.

²⁰ Salsabila Ramadhani. “Kebijakan Jilbab di SMA Pada Masa Daoed Joesoef (Penerapan Di Surabaya Tahun 1982-1991),” *Avatara*, e-Journal Pendidikan dan Sejarah (Jurusan Pendidikan dan Sejarah Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya) Vol, 6. No, 2. 2018.

Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos*, yang berarti cara ataupun jalan, sehubungan dengan melakukan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah tentang cara kerja, yaitu merupakan sebuah cara untuk memahami objek yang hendak menjadi sasaran ilmu. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan dengan cara sistematis dengan mengutamakan keobjektivitasan guna untuk memecahkan persoalan ataupun menguji suatu hipotesis guna untuk mengembangkan sebuah prinsip. Dengan penjelasan singkat barusan, maka dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian merupakan segala bentuk upaya untuk menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara teliti guna untuk memecahkan sebuah masalah ataupun melakukan pengujian hipotesis untuk memperoleh sebuah pengetahuan yang berguna untuk kehidupan manusia yang akan datang.²¹

Dalam menulis sebuah penelitian, penulis sendiri membutuhkan suatu cara agar penelitian tersebut lebih terstruktur dan dilakukan dengan benar. Dalam hal ini, penulis menggunakan sebuah metode penelitian sejarah. Dalam metode penelitian sejarah sendiri memiliki beberapa tahap yaitu : (1) Heuristik (2) Verifikasi (3) Interpretasi (4) Historiografi.

1. Heuristik

²¹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1.

Dalam mengerjakan sebuah penelitian sejarah, tahapan heuristic merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Heuristik biasa dikenal dengan pengumpulan sumber adalah sebuah tahapan yang digunakan untuk mencari berbagai macam sumber-sumber yang berkaitan dengan sebuah penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, sumber yang dapat dikumpulkan berupa artikel, penelitian terdahulu serta beberapa dokumen penunjang yang dapat dijadikan sebagai sebuah sumber untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan sumber tersebut, antara lain :

a. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini, data yang akan dicari berupa dokumen-dokumen serta data tertulis seputar objek yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, data tertulis yang bisa didapat berupa dokumen-dokumen, website, artikel berita dan juga hasil dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini. Dalam hal ini, data-data tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat ataupun menjadi saksi mata ketika peristiwa sejarah tersebut sedang berlangsung. Sumber primer sendiri merupakan sumber pokok atau

sumber utama dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah :

- a) Sumber pertama yang dapat dijadikan sebagai sumber primer adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penetapan kebijakan pemerintah pada peristiwa tersebut mulai dari latar belakang penetapan kebijakan hingga pengesahan kebijakan. Dalam sumber primer ini dapat di lihat di badan kearsipan Negara.
- b) Sumber primer yang kedua adalah beberapa karya yang telah dihasilkan oleh bapak Daoed Joesoef antara lain buku “Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya” yang merupakan buah dari refleksi pemikiran Daoed Joesoef yang diterbitkan oleh media Kompas.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder atau yang biasa disebut sebagai sumber pendukung adalah sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari sumber utama yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini sumber sekunder yang dipakai adalah :

- a) Jurnal Pendidikan Sejarah yang berjudul “Kebijakan Jilbab di SMA Pada Masa Daoed Joesoef (Penerapan di Surabaya Tahun 1982-1991)”.

- b) Jurnal Pendidikan Sejarah dengan judul “Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan”.
- c) Beberapa buku yang berkaitan dengan sekularisasi.
- d) Sejumlah artikel dari beberapa media seperti Jawa Pos, Tempo dan Kompas, beserta dengan pemaparan dari media lainya seperti You Tube.

2. Verifikasi

Setelah melakukan berbagai macam pengumpulan sumber yang ada, maka pekerjaan selanjutnya dalam melakukan sebuah penelitian dalam sejarah berikutnya adalah menyeleksi, menilai dan menguji berbagai sumber-sumber yang sudah diperoleh. Tugas utama pada tahapan verifikasi ini adalah berusaha untuk melihat kredibilitas dan aotentisitas dari berbagai sumber yang ada. Verifikasi atau kritik terhadap sumber merupakan salah satu langkah untuk mencari sebuah kebenaran sumber dengan cara menganalisa dan mengumpulksn ataupun memilah untuk mendapatkan sumber terpercaya atau yang benar-benar nyata. Verifikasi ini dilakukan dengan cara dengan membandingkan satu sumber dengan sumber yang lainya.²²

Dalam melakukan tahapan verifikasi ini terdapat dua kritik yang dilakukan yaitu, kritik internal dan kritik eksternal.

1) Kritik Internal

²² Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: dayu, 1978), 36.

Kritik internal adalah melakukan upaya penelitian terhadap sebuah sumber kebenaran terhadap bahasa, situasi kepenulisan, gaya dan ide pada sumber lisan maupun sumber dokumen. Dalam hal ini, dapat guna untuk meneliti tentang kebenaran yang benar-benar terjadi yaitu dengan mewawancarai orang-orang terdekat ataupun keturunan langsung dari menteri pendidikan dan kebudayaan pada waktu itu yakni bapak Daed Joesoef, dan juga responden dengan beberapa pengurus ormas Islam yang telah mengalami peristiwa tersebut.

2) Kritik Eksternal

Kritik eksternal ini digunakan untuk mengkaji dari bentuk luar tujuannya guna untuk menggali keaslian dari kertas, ejaan, gaya tulisan dan semua tampilan dalam bentuk luarnya guna untuk mengetahui sebuah keaslian dari suatu sumber tersebut. Dalam hal ini, dapat dilihat kepada orang yang akan hendak di wawancarai guna untuk memilah orang-orang yang benar-benar masih hidup pada zaman tersebut.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan sebuah tahapan yang digunakan untuk menganalisis atau menafsirkan data-data yang sudah diperoleh serta kemudian data-data yang sudah melalui tahapan analisis kemudian data tersebut digabungkan lalu kemudian bisa menghasilkan sebuah fakta. Pada tahapan interpretasi ini, penulis juga berupaya untuk mendeskripsikan serta mengurutkan sebuah peristiwa sejarah.

Dalam kepenulisan penelitian ini, penulis juga telah mengurutkan sebuah peristiwa sejarah yang dimulai dari biografi singkat dari menteri pendidikan dan kebudayaan Daoed Joesoef beserta latar belakang pendidikannya, kemudian perjalanan karir dari Daoed Joesef sebelum menjabat sebagai seorang menteri, hingga latar belakang dan penerapan sebuah kebijakan yang dinilai sekuler dan yang terakhir adalah dampak dari suatu kebijakan yang dinilai sekuler tersebut terhadap umat Islam yang diwakili oleh beberapa ormas Islam.

4. Historiografi

Historiografi merupakan sebuah tahapan ataupun kegiatan tahap akhir dalam melakukan upaya penelitian terhadap sejarah atau lebih dikenal dengan kepenulisan sejarah. Pada tahapan ini, penulis ingin menulis keseluruhan rangkaian peristiwa sejarah dari sumber-sumber dan data yang telah ditetapkan. Data yang telah didapatkan tersebut, pada kondisi sebelumnya telah mengalami proses pengujian serta penelitian dengan cara yang mendalam sebelum digunakan sebagai sumber dalam melakukan kepenulisan sejarah.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam kepenulisan sebuah penelitian diperlukan adanya sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan agar sebuah tulisan yang berkaitan dengan penelitian tersebut menghasilkan sebuah tulisan yang lebih sistematis dan juga lebih mempermudah dalam memahami seluruh isi yang tertuang dalam sebuah tulisan ilmiah. Sistematika penulisan merupakan tatanan urutan

dalam penyusunan sebuah karya tulis yang berbasis ilmiah yang memberikan sebuah gambaran garis besar mengenai isi yang terkandung pada karya tulis ilmiah tersebut.

Adapun secara keseluruhan rangkain dalam kepenulisan ilmiah yang berjudul “Dampak Kebijakan Sekularisasi Pendidikan Masa Daoed Joesoef Tahun 1978-1983 Terhadap Umat Islam” terdiri dari 5 bab yang merupakan bentuk satu kesatuan yang utuh, antara lain:

Bab pertama, yakni merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan masalah, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu beserta dengan metode penelitiannya. Pada bagian pembahasan ini akan dijelaskan secara garis besar tentang penelitian yang dilakukan serta beberapa metode, teori dan pendekatan yang akan digunakan dalam kepenulisan penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang biografi serta riwayat hidup dari Menteri pendidikan tahun 19-19 Daoed Joesoef yang berisi tentang latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, perjalanan karir bapak Doaed Joesoef selama hidupnya.

Bab ketiga, ini akan menjelaskan tentang bagaimana munculnya kebijakan yang dianggap pada penelitian ini sebagai bentuk sekularisasi, seperti perubahan hari libur selama berjalannya bulan Ramadhan dan pelarangan untuk berhijab bagi siswi muslim yang sedang menempuh pendidikan.

Bab keempat, ini akan menjelaskan tentang dampak terhadap umat Islam setelah munculnya kebijakan yang dinilai sekuler ini. Dampak ini sangat dirasakan oleh umat muslim serta perseorangan khususnya para siswi muslim dan munculnya penolakan kebijakan oleh organisasi masyarakat muslim.

Bab kelima ini sekaligus menjadi bab terakhir yang berisi sebuah kesimpulan tentang rangkuman dari beberapa pembahasan yang sudah di tulis dalam penelitian ini yang meliputi biografi dari Menteri pendidikan Daed Joesoef, kebijakan yang dinilai sekuler dalam penelitian ini serta dampak bagi umat Islam karena ditekannya kebijakan yang di nilai sekuler ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

BIOGRAFI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAOED JOESOEF 1978-1983

A. Masa Kecil dan Pendidikan

Daoed Joeseof lahir di Medan pada tanggal 8 Agustus 1926, merupakan seorang anak keempat dari lima bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Moehammad Joesoef dan Siti Djasi'ah yang berasal dari Jeron, Benteng, Yogyakarta. Daoed Joesoef merupakan seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kabinet pembangunan III di dalam kekuasaan rezim Orde Baru. Jika dilihat dari usia hidupnya, Daoed Joesoef merupakan salah satu seorang menteri yang diberikan umur panjang, karena Daoed Joesoef wafat di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2018 dalam usia 91 tahun. Dari beberapa literatur yang tersedia tidak diketahui pasti mengenai sosok dari kedua orang tua Daoed Joesoef. Namun, keberadaan kedua orang tua nya sudah diabadikan ke dalam sebuah karyanya yang terkenal dengan judul "*Emak*". Ayahnya sendiri adalah seorang mantan jawara yang dalam kehidupan kesehariannya melakukan sebuah kegiatan memeras susu sapi, sedangkan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga yang sederhana, pintar dan kreatif.²³

Pasangan Moehammad Joesoef dan Siti Jasiyah merupakan orang kampung biasa yang buta huruf serta tidak berpendidikan secara formal. Mereka merupakan salah satu pasangan perantauan yang berasal dari Aceh,

²³ Daoed Joesoef, *Emak Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai ke Sorbonne* (Jakarta: Kompas, 2005), 2.

dan juga merupakan pasangan perantauan yang pertama sehingga masih muda untuk mendapatkan kawasan hunian yang layak di sekitar Kota Medan. Pada sisi lain, kemampuan dalam bidang agama yang cukup baik guna untuk menjadikan bekal yang cukup kuat dalam mendidik anak-anaknya. Daoed Joesoef merupakan anak ke empat dari lima bersaudara yang bermukim di pinggiran kota Medan. Antara kampung Daoed dengan kawasan hutan sendiri hanya terpisah oleh sebuah jalan raya yang bernama *Achterweg*. Hutan tersebut dikatakan oleh Daoed masih sangat lebat, yang dimana ketika memasuki kawasan hutan tersebut semakin dalam maka dipastikan tidak bisa menemui sinar matahari dikarenakan lebatnya pepohonan pada hutan tersebut, disamping itu para penduduk juga memanfaatkan serta beberapa dari lainnya menggantungkan hidupnya dari hutan tersebut, termasuk keluarga Daoed Joesoef yang sering memanfaatkan hasil hutan untuk perabotan rumah.²⁴

Orang tua Daoed Joesoef sendiri merupakan seseorang yang tidak pernah merasakan dunia pendidikan sedikitpun, sehingga membuat keduanya menjadi seorang yang buta huruf. Keduanya hanya bisa menuliskan bahasa Melayu dengan aksara Arab, yang menandakan ciri khas dari lulusan madrasah seperti dengan kebanyakan orang kampung segenerasinya. Namun, mereka sendiri sangat menyadari bahwa gaya pendidikan formal seperti yang sudah disediakan oleh Belanda sangatlah penting. Oleh karena itu emak dari Daoed Joesoef yakni Siti Djasi'ah

²⁴ Daoed Joesoef, *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), 7.

memberikan sebuah pesan yang dimana pesan tersebut berisikan tentang salah satu hadist yaitu “menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat, diupayakan dalam hal menuntut ilmu semenjak dalam buaian seorang ibu hingga telah sampai ke liang lahat, bahkan kalau perlu carilah ilmu hingga ke negeri China”. Ketika sang emak memberikan nasehat tersebut, ghairah-ghariah akan haus terhadap dunia pendidikan pun menghinggapi Daoed.²⁵

Kemudian orang tua Daoed Joesoef menyuruhnya untuk belajar mengaji, pada awalnya Daoed dibelajari oleh kedua orang tuanya, yang dimana ketika habis sholat subuh mereka mengadakan forum mengaji yang dipimpin langsung oleh bapak Daoed. Pada awalnya Daoed hanya disuruh belajar menghafal huruf hijaiyah, kemudian setelah Daoed mampu untuk membaca beberapa surat pendek barulah orangtuanya menyuruhnya untuk belajar mengaji kepada seseorang yang ada di kampungnya yang dimana seseorang tersebut terkenal dengan keshalehannya. Tidak hanya itu, Daoed juga mengimbangnya dengan masuk di madrasah sehingga membuat hafalan serta bacaan Al-Qur'an nya sudah bisa dikatakan sempurna. Dan pada akhirnya dilakukanlah ujian yang diselenggarakan oleh beberapa ustadz, kemudian Daoed diminta untuk melafalkan beberapa surat pilihan yang sudah dipilih oleh ustadz tersebut. Setelah selesai ujian, Daoed dinyatakan lulus dan mendapatkan predikat khatam Al-Qur'an.

²⁵ Daoed Joesoef, *Emak Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai ke Sorbonne* (Jakarta: Kompas, 2005), 5.

Dari kalangan anggota keluarga dari Daoed Joesoef sendiri kebanyakan dari mereka merupakan seorang aktivis seperti pamannya. Pamannya yang bernama Leman yang merupakan saudara sepupu dari Siti Jasiyah merupakan orang yang dianggap Daoed sebagai pencerah dalam keluarganya, karena pamannya sendiri merupakan orang yang sudah mengenyam pendidikan Belanda, hal ini tentu berbeda dengan kondisi orang tua Daoed yang tidak mengenyam pendidikan tersebut sama sekali. Sehubung paman Daoed tidak memiliki seorang anak, maka perhatiannya ditujukan kepada Daoed selaku anak laki-laki yang paling tua. Dari hal tersebut lah merupakan hal yang paling membekas dalam sanubarinya serta dikatakan sesuatu hal yang paling berpengaruh dalam proses pembentukan dirinya. Pada masa kecil hingga beranjak dewasa, Daoed Joesoef memang lebih banyak menghabiskan waktu di kota Medan. Pendidikan dasarnya dilalui di bangku *Holland Inlandsche School* (HIS) Medan.²⁶

Semenjak berada di sekolah HIS, pamannya sendiri yang mengajarkannya bahasa Belanda sehingga Daoed sendiripun akhirnya mahir berbahasa Belanda dengan baik. Sejak menamatkan sekolah dasar di HIS, Daoed melanjutkan studi di *Meer Uitgebried Lager Onderwijs* (MULO) di kota yang sama yakni Medan. Namun, dalam pertengahan tahun 1942 kekuasaan Indonesia beralih ke tangan militer Jepang, maka Daoed Joesoef menyelesaikan pendidikannya di lembaga pendidikan yang saat itu

²⁶ Daoed Joesoef, "*Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*", (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), 31.

dinamai MULO beralih menjadi *Tjuu Gakko* Medan. Setelah itu, Daoed menamatkan pendidikan formalnya pada tahun 1944, namun pada hal tersebut tidak bisa diketahui secara jelas bagaimana perjalanan proses pendidikannya, dimana kedua orang tua nya sendiri bukan merupakan golongan keluarga yang berkecukupan, apalagi pada masa tersebut termasuk dalam suasana serba tidak enak karena masuk dalam kekuasaan Jepang yang dikenal sangat otoriter.²⁷

Memasuki periode awal zaman kemerdekaan, Daoed Joesoef langsung terjun ke dalam medan juang serta terdaftar sebagai bagian dari anggota militer dengan status aktif serta mempunyai pangkat sebagai seorang Letnan muda. Sampai di akhir tahun 1946, beliau sendiri masih aktif di devisi IV Sumatera Timur, dan pada tahun 1950 beliau dipindahkan ke komando militer Pangkalan Jakarta Raya. Karir militer dari Daoed Joesoef sendiri cukup berkembang dengan pesat, sampai dia diangkat sebagai bagian dari tim penasehat Irjenterpra atau asisten urusan Angkatan Darat Penguasa Perang Tertinggi pada periode 1959-1960. Namun setelah itu, beliau langsung mengundurkan diri dari dunia kemiliteran Republik Indonesia dengan pangkat terakhir yakni menjadi seorang Letnan dua.²⁸

Selama Daoed Joesoef dipindahkan serta bermukim di Jakarta, beliau sendiri kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama menempuh studi di Universitas Indonesia, pada tahun

²⁷ Ibid, 48.

²⁸ S. Sumardi, dkk, *Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984), 41.

1958 beliau melakukan sebuah riset penelitian guna untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 nya, riset tersebut dilakukan di kawasan Jawa tengah dengan judul “Gerakan dan Pemberontakan Koperasi”. Kemudian pada tahun selanjutnya yakni 1959, Daoed Joesoef telah memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dengan diperolehnya gelar sarjana Ekonomi tersebut, merupakan sebuah alasan beliau guna untuk menyudahi kiprah di dunia militer Indonesia. Kemudian pada tahun 1960, Daoed Joesoef melanjutkan studinya untuk memperoleh gelar master di Universite de Paris Pantheon-Sorbone, Prancis.

Ketika Daoed Joesoef sedang berjibaku guna untuk menyelesaikan pendidikan serta program master di Sorbone University, Daoed sendiri telah dikejutkan dengan kabar meninggalnya ibunya tercinta yaitu Siti Jasiah. Kemudian, setelah larut dalam kesedihan yang sangat mendalam, timbul lah sebuah ide Daoed untuk menceritakan kisah ibunya dengan merilis sebuah buku yang berjudul *Emak* yang kemudian terbit untuk pertama kalinya pada tahun 2003. Setelah beberapa waktu mengalami duka yang cukup mendalam bagi Daoed Joesoef, dengan segera beliau mempercepat untuk merampungkan dua gelar doktornya, yakni pada bidang Ilmu Keuangan Internasional dan Hubungan Internasional pada tahun 1965, serta Ilmu Ekonomi 1973 di Universite de Paris, Pantheon-Sorbone, Prancis. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2016, harian Kompas menyebutkan bahwa Daoed Joesoef merupakan orang pertama Indonesia yang mempelajari tentang Ilmu Ekonomi di lembaga pendidikan tinggi Prancis dan orang Indonesia

pertama yang memperoleh gelar doctor negara atau *Doctoral d'Etat*, gelar tersebut merupakan sebuah gelar yang cukup tinggi dibandingkan dengan gelar doctor universitas dari Universitas Sorbone.²⁹

B. Jenjang Karir Menteri Pendidikan Daoed Joesoef

Ketika Daoed Joesoef masih berstatus sebagai seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia, Daoed sendiri cukup kuat untuk menguasai bidang keilmuan Ekonomi Moneter, sehingga sampai pada saat itu Daoed sempat ditawari untuk menjadi seorang Gubernur di Bank Indonesia, hal ini dalam rangka menggantikan Sjarifruddin Prawiranegara, peristiwa ini sendiri terjadi pada tahun 1953. Namun, karena sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tawaran tersebut ditolaknya. Menurut, Daoed Joesoef sendiri dengan menerima tawaran tersebut maka tidak akan lagi guna untuk bebas berkarya dan menulis jika menempati jabatan Gubernur Bank Indonesia.

Memasuki tahun 1956, mengingat dalam perjalanan proses pendidikannya yang cukup cemerlang pada bidang akademik itu sendiri, Daoed Joesoef kemudian ditunjuk untuk menjadi seorang asisten dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setahun menjelang beliau merampungkan tugas skripsinya, yakni pada tahun 1958, Daoed Joesoef sendiri telah resmi untuk diangkat sebagai dosen di fakultas yang sama. Mengingat keahliannya dalam bidang Ekonomi Moneter dan Perhitungan

²⁹ Gusti Asnan, *Biografi Tujuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* "Disiapkan Dalam Rangka Penulisan Buku Sejarah Tokoh Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia" (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Pendapatan Nasional, juga membawa seorang Daoed Joesoef menjadi dosen terbang di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam hal ini, merupakan suatu prestasi yang luar biasa, karena sebelum waktu kelulusan tiba, Daoed Joesoef sudah aktif menjadi seorang dosen serta mengajar di beberapa Universitas ternama pada saat itu. Berkat kecemerlangan pada bidang akademiknya tersebut, setelah itu beliau langsung terbang ke Universitas Sorbone Prancis guna untuk memperdalam terkait ilmu keuangan, namun di Sorbone Daoed meluaskan lagi pengetahuannya dengan mengambil program master hingga menjadi seorang doktor di bidang Ilmu Keuangan Internasional dan Hubungan Internasional.³⁰

Dalam perjalanan karir struktural pada dunia akademik dari Daoed Joesoef sendiri cukuplah melesat. Beberapa kali pada lingkup Fakultas Ekonomi, nama Daoed Joesoef sendiri telah tercatat sebagai kepala departemen maupun kepala jurusan. Hal tersebut sendiri terjadi hanya dalam kurun waktu 3 tahun, yakni pada tahun 1962-1965. Sementara itu, beberapa jabatan yang telah disandangnya adalah:

1. Kepala Departemen Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1962-1965.

³⁰ Gusti Asnan, *Biografi Tujuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* "Disiapkan Dalam Rangka Penulisan Buku Sejarah Tokoh Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia" (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

2. Kepala Jurusan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1962-1965.
3. Kepala Jurusan Umum dan Ekonomi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1964-1965.
4. Kepala Departemen Administrasi Umum pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1964-1965.

Semenjak Daoed Joesoef telah berhasil untuk meruampungkan studinya di Sorbone, Prancis. Semenjak itulah Daoed kembali ke Indonesia untuk mengabdikan kepada almamaternya yaitu Universitas Indonesia. Kecemerlangan pada dunia akademik yang dimiliki oleh Daoed Joesoef sendiri, segera dimanfaatkan dengan betul oleh pemerintahan pada saat itu yaitu pemerintahan Orde Baru untuk merekrutnya masuk ke dalam *Centre for Strategic and International Studies* atau CSIS. Kejadian tersebut bermula pada tahun 1969, pada saat itu Sofyan Wanandi yang ditugasi oleh Ali Moertopo yang pada saat itu menjabat sebagai asisten pribadi pada salah satu bidang khusus Presiden Soeharto yang ditugaskan untuk berkeliling pada negara-negara kawasan Eropa. Kemudian Sofyan menemui para tokoh-tokoh intelektual muda yang berasal dari Indonesia pada sejumlah kota di kawasan negara-negara Eropa, salah satu tokoh intelektual yang ditemuinya pada saat itu adalah Daoed Joesoef, yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Negara Prancis. Sofyan sendiri lalu tertarik akan kecerdasan serta kekritisannya yang dimiliki oleh Daoed Joesoef dan kemudian mengajaknya untuk ikut serta

guna untuk membesarkan lembaga *think thank* yang ada pada masa Orde Baru tersebut.

Dalam keterlibatan Daoed Joesoef semasa masuk dalam *Centre of Strategic and International Studies* atau CSIS membuat namanya berkibar, tercatat beberapa kali Daoed memperoleh kedudukan yang cukup strategis pada lembaga tersebut. Kemudian pada tahun 1970-1973 Daoed telah didaulat sebagai direktur CSIS yang termasuk dalam keanggotaan research CSIS di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat. Pada saat sebelum dipilih untuk menjadi seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Soeharto, yakni pada tahun 1976-1978 Daoed telah menjabat sebagai seorang asisten ahli menteri pada departemen yang sama. Setelah menjabat menjadi seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1984-1999 Daoed menjabat sebagai ketua dewan direktur dari CSIS, dan selepas tahun 1999 Daoed berada dalam posisi menjadi seorang pembina pada yayasan yang sama.³¹

C. Pemikiran Daoed Joesoef Terhadap Pendidikan dan Kebudayaan

Selepas pulang dari Sorbone Prancis guna menyelesaikan akademiknya, kini tawaran untuk menjadi seorang menteri menghampirinya. Presiden Soeharto sendiri yang memintanya untuk menjadi seorang menteri pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada susunan Kabinet Pembangunan III yang dilantik pada tanggal 31 Maret

³¹ Daoed Joesoef, *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), 192.

1978. Pada awalnya Presiden Soeharto meminta Daoed Joesoef untuk menjadi seorang menteri bukan untuk mengurus tentang sistem ekonomi negara yang merupakan keahlian yang dimiliki oleh Daoed Joesoef sendiri, melainkan pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian, Daoed diundang langsung oleh Soeharto di Keluarga Cendana untuk mempresentasikan konsep kerja dalam kurun waktu 5 tahun kedepan bersama dengan calon menteri-menteri lainnya, kemudian Daoed Joesoef pun menyampaikan konsep pendidikan yang sudah disiapkannya setelah mendapati dirinya diminta langsung oleh Presiden Soeharto untuk menjadi seorang menteri.

Setelah menyampaikan konsep kerja pada kementerian bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef sendiri kaget ketika Presiden Soeharto mengetahui konsep yang akan diajukannya tentang dunia pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu Daoed menganggap hal tersebut merupakan sebuah misteri, dimana tidak ada yang tahu akan konsep pendidikan yang sudah dirancang oleh Daoed Joesoef kecuali mantan wakil presiden Indonesia yaitu Mohammad Hatta. Sebagai seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 1978-1983, Daoed Joesoef sendiri telah menyiapkan sebuah konsep pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, yang dimana konteks yang diajukannya dipergunakan untuk membangun masa depan bangsa melalui pendidikan pada generasi muda. Menurut Daoed sendiri, generasi muda merupakan salah satu bentuk investasi yang besar bagi keberlangsungan bangsa.

Menurutnya, “mereka generasi muda adalah harapan sekaligus menjadi manusia masa depan, ada sebuah nilai investasi yang terdapat disana dengan memberikan cukup ilmu pada generasi muda”.³²

Dalam masa perjalanan pemerintahan pada Kabinet Pembangunan III Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Daoed Joesoef merupakan salah satu menteri yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan yang paling banyak membuat sebuah kebijakan yang cukup kontroversial serta juga setiap kebijakannya memiliki sebuah arti tertentu dalam perjalanan sejarah dunia pendidikan di Indonesia pada khususnya serta dalam kehidupan berbangsa pada umumnya. Beberapa kali kebijakan yang dikeluarkan oleh Daoed Joesoef sendiri dalam masa menjadi seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapat tanggapan serta protes yang cukup meluas pada kalangan masyarakat di Indonesia.

Pada kebijakan pertamanya yang sempat menyulut kehebohan pada masyarakat terjadi pada bulan keempat setelah pelantikan sebagai seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat itu, Daoed Joesoef telah menyusun program perpanjangan wajib belajar dan mengajar yang digunakan untuk tahun ajaran 1978. Daoed sendiri memutuskan untuk menetapkan sebuah kebijakan yang dalam isinya memperpanjang tahun ajaran selama enam bulan, sehingga pada tahun ajaran yang berikutnya akan dimulai pada bulan Juli tahun 1979. Dalam memutuskan kebijakan tersebut

³² Daoed Joesoef, *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), 195.

alasan yang digunakan oleh Daoed Joesoef sendiri karena efek dari geografi wilayah Indonesia yang termasuk berada dalam wilayah yang tropis, sehingga hanya terdapat dua musim saja, yang dimana pada bulan desember sendiri merupakan bulan musim hujan yang sangat lebat karena hal tersebut lah bisa merusak suasana liburan yang digunakan oleh para siswa sebelum tahun ajaran baru di mulai. Kedua, dimulainya tahun ajaran baru pada bulan Januari yang terjadi sejak tahun 1966 dianggapnya telah menyulitkan perencanaan terhadap susunan konsep pendidikan, karena pada masa tersebut juga telah berakhirnya masa tahun anggaran, sehingga hal tersebut dianggapnya sebagai sesuatu yang menyulitkan untuk menyusun konsep pendidikan untuk setahun kedepan. Jadi, pengunduran ke bulan Juli yang dimaksud kan oleh Daoed Joesoef untuk menyesuaikan diri dengan permulaan tahun anggaran yang baru.

Sebuah rencana yang dilakukan oleh Daoed Joesoef tersebut juga mendapatkan sebuah reaksi karena beredar luas pada kalangan masyarakat yang kebanyakan menentang akan kebijakan tersebut. Penolakan itu pun terjadi kepada hampir seluruh kalangan masyarakat, yang pada umumnya menentang akan kebijakan tersebut. Mulai dari kalangan orang tua siswa hingga pimpinan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, rekostr dari beberapa universitas, mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mantan gubernur dari wilayah DKI Jakarta, serta berbagai macam pihak lainnya. Meski dalam kurun waktu sekitar empat minggu setelag diputuskannya kebijakan tersebut, Daoed Joesoef pernah mengatakan untuk menunda

jalannya kebijakan tersebut, atau dengan kata lain tidak jadi dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1979. Namun dalam kenyataannya rencana akan kebijakan tersebut tetap dijalankan, serta pergantian terhadap awal tahun ajaran baru tetap terjadi.

Kebijakan selanjutnya yang diluncurkan oleh Daoed Joesoef pada hari pertama dalam kepemimpinannya sebagai seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah membentuk sebuah komisi pembaharuan pada bidang pendidikan. Komisi tersebut bertugas untuk memikirkan sebuah sistem pendidikan yang baru. Selain itu juga, komisi tersebut juga menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan berbagai macam informasi dari seluruh pelosok tanah air Indonesia, yang digunakan untuk membuat sebuah konsep yang akan diterapkan serta selanjutnya memaparkan konsep tersebut kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Daoed Joesoef sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Bahkan, dia sendiri telah menegaskan bahwa konsep tersebut setidaknya akan berbalik lagi untuk masyarakat, yang pada akhirnya selesainya pekerjaan ini akan melahirkan undang-undang pokok Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menimbulkan protes pada kalangan para mahasiswa dan juga masyarakat adalah pemberlakuan terhadap normalisasi kehidupan kampus atau badan koordinasi kemahasiswaan atau sering disebut dengan NKK/BKK. Kebijakan tersebut berlaku setelah menteri Pendidikan dan

Kebudayaan yaitu Daoed Joesoef mengeluarkan sebuah surat keputusan nomor 0156/U/1978 yang berisi tentang normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kemahasiswaan yang berhasil untuk menghilangkan segala aktivitas politik dan organisasi mahasiswa yang berada dalam lingkungan kampus. Dengan keluarnya surat keputusan tersebut setiap kampus yang ada di Indonesia menjadi steril dari segala aktivitas yang bermuatan politik, dari kelembagaan mahasiswa seperti senat mahasiswa dan dewan eksekutif mahasiswa pada setiap perguruan tinggi resmi dibubarkan dan beserta segala kegiatan politik dari organisasi ekstra kampus berhasil dihilangkan dalam lingkungan kampus.

Kebijakan yang dianggap sebagai salah satu kebijakan yang paling kontroversial tersebut sebetulnya adalah sebuah akumulasi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa itu sendiri pada masa-masa sebelum kepemimpinan Daoed Joesoef menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beragam peristiwa yang melibatkan para mahasiswa tersebut bermula dari kebanyakan kalangan mahasiswa melakukan serangkaian protes terhadap kepemimpinan pemerintah, serta dalam pihak pemerintah sendiri sepertinya tidak ingin untuk menjadi sasaran akan protes yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. Pada fase awal dari perjalanan sejarah negara Indonesia pada abad kontemporer, sebuah kebebasan yang dimiliki serta dinikmati oleh kalangan mahasiswa yang berhasil untuk menumbangkan rezim Orde Lama yang terjadi pada tahun 1966. Kemudian, pada tahun 1971 kalangan mahasiswa melakukan protes terhadap sikap

pemerintah yang dianggap oleh para mahasiswa menyebabkan jalannya kegiatan pemilihan umum atau Pemilu tidak sesuai dengan motto dari Pemilu sendiri yaitu jujur dan adil. Karena hal tersebut lah kalangan dari mahasiswa sendiri mengkampanye kan Golongan Putih, yaitu sebuah golongan yang tidak ikut serta untuk memberikan suara dalam kegiatan Pemilu.³³

Tidak hanya itu saja, para mahasiswa juga mengkritisi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembangunan terhadap Taman Mini Indonesia Indah yang dilakukan pada tahun 1973 yang dianggapnya sebagai kegiatan yang digunakan untuk memboroskan keuangan negara karena pada masa tersebut anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun Taman Mini Indonesia Indah sebesar Rp 10,5 Milyar rupiah, yang pada masa tersebut merupakan sebuah nominal yang sangat besar. Selanjutnya, mahasiswa juga melakukan kegiatan protes dengan keras terhadap pemerintah karena derasnya modal asing masuk ke wilayah Indonesia, karena hal tersebut beberapa perwakilan dari kalangan mahasiswa melakukan kegiatan demonstrasi dengan turun ke jalan. Kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa tersebut selanjutnya dikenal sebagai sejarah dengan nama MALARI atau malapetaka lima belas Januari pada tahun 1974 yang dianggap oleh kalangan mahasiswa ataupun

³³ Sardiman dan Yuliantri, *Dinamika Pendidikan Masa Orde Baru (Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef dan Nugroho Notosuseno)* (Yogyakarta: FIS Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

masyarakat sebagai bentuk aktivitas keterlaluhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya.

Namun, bagi seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Daoed Joesoef menyimpulkan hal yang berbeda. Dia menganggapnya bahwa apa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa pada saat itu adalah sebuah kegiatan politik praktis, dalam kacamata dari Daoed Joesoef sendiri mahasiswa bukanlah bagian dari pelaku politik praktis, tujan utama yang dilakukan oleh seorang mahasiswa sendiri adalah untuk membangkitkan kemampuan nalarnya serta mengembangkan kemampuan untuk berfikir secara analisis dan sintesis. Menurut Daoed Joesoef sendiri, silahkan saja bagi para mahasiswa untuk mempelajari aktivitas yang bermuatan politik, akan tetapi tidak dengan kegiatan politik yang bersifat praktis. Dengan diterbitkannya kebijakan NKK/BKK, Daoed berupaya untuk mengembalikan marwah kampus sebagai sebuah lingkungan yang didiami oleh para kaum intelektual, sebuah lingkungan atau tempat yang dipergunakan untuk menuntut ilmu yang melahirkan para cendekiawan-cendekiawan.

Sikap kebijakan yang dikeluarkan oleh Daoed Joesoef yang tidak kalah kontroversialnya adalah terhadap simbol-simbol yang identik dengan umat Islam. Hal ini didasari karena Daoed Joesoef sendiri lebih mencintai kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dengan hal tersebut apapun agamanya maka haruslah tetap untuk memakai budaya Indonesia, meski negara Indonesia sendiri merupakan negara yang majemuk yaitu

terdiri dari berbagai macam agama. Kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau sendiri antara lain adalah tidak meliburkan sekolah pada saat memasuki bulan Ramadhan, yang dimana bulan tersebut merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam untuk melakukan ibadah. Selain itu juga, Daoed juga menolak untuk mengucapkan salam “Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh” dalam acara-acara resmi dan memilih untuk mengucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam.

Tidak hanya itu saja, sensitifitas Daoed Joesoef terhadap simbol-simbol dari agama Islam pun terus berlanjut. Beliau sendiri membuat sebuah kebijakan untuk para siswi yang beragama Islam untuk tidak memakai hijab ketika melakukan kegiatan pembelajaran pada lingkungan sekolah. Hal ini didasarkan oleh beliau karena hijab sendiri bukan termasuk bagian dari budaya Indonesia, melainkan budaya dari Timur Tengah. Hal tersebut mendapatkan perhatian dari organisasi masyarakat yang berlandaskan agama Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memberikan respon berupa teguran bagi Daoed Joesoef untuk tidak mengeluarkan kebijakan tersebut, tetapi tetap saja kebijakan tersebut dijalankan oleh Daoed Joesoef. Lebih parahnya lagi, Daoed Joesoef juga sempat mengusulkan untuk meniadakan pelajaran agama Islam pada sekolah-sekolah umum. Hal ini menurut Daoed, tidak seharusnya sekolah umum tersebut memuat pelajaran agama, karena sudah banyak sekolah-sekolah agama yang sudah ada, apalagi ditambah dengan adanya pesantren

yang merupakan lembaga yang memfokuskan pendidikan pada bidang agama.

Pada masa kepemimpinan menjadi seorang menteri, dalam departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri mendapatkan kucuran dana yang cukup besar, bahkan pada tahun-tahun terakhir masa jabatan dari Daoed Joesoef, departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan dana yang paling besar diantara departemen dalam susunan Kabinet Pembangunan III pada masa Orde Baru. Total dana yang didapatkan departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun terakhir ialah sebesar 1,3 Triliyun Rupiah. Dengan kucuran dana sebesar itu, departemen kementeriannya melakukan beragam upaya yang berguna untuk mewujudkan rencananya. Hingga memasuki tahun 1982 telah dibangun sebanyak 16 Taman Kanak-Kanak, 667 Sekolah Menengah Pertama, 131 Sekolah Menengah Atas, 8 Sekolah Teknik Mesin, 7 Sekolah Luar Biasa dan melakukan kegiatan rahabilitasi terhadap 8 ruangan kelas, membangun Politeknik, pengadaan Laboratorium, membeli sejumlah Alat Peraga, pengadaan buku yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar sebanyak lebih dari 2,8 juta eksemplar, serta pemberian beasiswa kepada para siswa dan siswi yang dianggap berprestasi ketika menempuh proses pendidikan. Khusus pada point terakhir tersebut, Daoed Joesoef lebih memberi perhatian yang cukup besar pada siswa dan siswa dari Indonesia bagian timur.

Masih terlalu minimnya tenaga pengajar yang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu juga menaruh perhatian besar bagi Daoed Joesoef selaku

menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1979, beliau mengintruksikan untuk para universitas-universitas baik swasta maupun negeri untuk membuka diploma akta mengajar yang di khusus kan kepada para calon-calon guru. Dengan hal tersebut, sejak era kepemimpinan Daoed Joesoef, beberapa universitas juga mulai memberikan prioritas yang begitu penting dalam menyediakan calon-calon guru. Tidak hanya pada sektor guru saja, pada tingkatan sarjana pun juga mendapatkan perhatian yang sama, dengan itu beberapa universitas membuka jenjang S2 dan S3 untuk calon pengajar pada perguruan tinggi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru merupakan sebuah masa kepemimpinan sebuah rezim yang sentralis. Kurikulum atas pendidikan pada zaman Orde Baru yang pertamakali diperkenalkan pada tahun 1968 oleh bapak Daoed Joesoef, yang pada saat itu selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada pengenalan kurikulum tersebut sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari pengaruh politik Presiden Soeharto sendiri yang pada saat itu sudah muncul sikap akan pemimpin yang otoriter, Sehingga tidak heran jika kemudian para pelaksana pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, dan para peserta didik tidak memiliki sebuah pilihan sama sekali, kecuali dengan mengikuti arahan dan peraturan yang dikeluarkan langsung oleh pemerintahan pusat.

Pada tingkat pendidikan yang berbasis tentang nilai-nilai keagamaan seperti pondok pesantren atau lembaga lainnya yang berbasis tentang keagamaan justru mengalami pembatasan yang jauh lebih ketat. Karena

pada masa tersebut agama sendiri justru merupakan sebuah unsur yang bisa untuk mengancam akan ketertiban politik yang ada di Indonesia. Padahal dialaog tentang persoalan kerukunan antar umat beragama sudah pernah dilakukan pada tahun 1967. Namun, baru pada tahun 1978 saat bapak Alamsjah Ratoe Perwiranegara menjadi Menteri Agama di Indonesia mencuatlah akan sebuah isu-isu tentang toleransi antar umat beragama. Dengan adanya hal tersebut, isu-isu tentang adanya intoleransi antar umat beragama ini mendapatkan sorotan tajam oleh pemerintah, hal tersebut sendiri juga diiringi dengan kebangkitan kelompok-kelompok Islam garis keras.³⁴

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bapak Daoed Joesoef dilantik pada saat bersamaan dengan kebangkitan kelompok-kelompok Islam garis keras tersebut, maka hal itu merupakan sebuah ancaman bagi dunia pendidikan sendiri, khususnya pada dunia pendidikan yang berbasis akan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Menurut Salim Said dalam bukunya yang berjudul “*Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*” telah menyebutkan bahwa sosok Daoed Joesoef sendiri merupakan salah satu seseorang yang tidak mendukung kebijakan presiden Soeharto yang bersinggungan dengan Islam Syariah. Daoed Joesoef sendiri juga disebut menjunjung tentang nilai-nilai sekularisme yang biasanya ada di Negara Prancis yang tidak mengagungkan suatu agama tertentu. Maka tidak heran

³⁴ Salim Haji Said, “*Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*”, (Bandung: MIZAN, 2016), 125.

jika dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cenderung untuk menolak tentang kebijakan pendidikan yang berbasis akan nilai-nilai yang mengandung unsur keagamaan. Contohnya seperti tulisan sebelumnya, yang dimana melarang pemakaian jilbab pada setiap sekolah negeri yang juga merupakan salah satu cara memisahkan antara dunia pendidikan dengan politik dan agama.³⁵

Dalam buku biografinya yang berjudul "*Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*" dan buku yang beliau persembahkan untuk ibunya yaitu Siti Jasiah yang berjudul "*Emak: Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne*" telah menyebutkan bahwa sosok dari Daoed Joesoef sendiri merupakan penganut nilai-nilai agama Islam secara kental, bahkan lingkup keluarganya sendiri juga merupakan penganut Islam yang kental serta mahir karena kebanyakan dari keluarganya merupakan lulusan pondok pesantren, bahkan Daoed Joesoef sendiri sejak masih kecil sudah mengkhhatamkan Al-Qur'an dimana sangatlah jarang orang sebayanya bisa melakukan hal tersebut.

Namun, hal ini berbanding terbalik ketika sosok Daoed Joesoef telah memimpin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau merencanakan akan menghapus pendidikan yang berbasis agama, menurutnya doktrin agama yang dicampurkan dalam dunia pendidikan seperti yang diterapkan di beberapa pondok pesantren berpotensi untuk

³⁵ Salim Haji Said, *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto* (Bandung: MIZAN, 2016), 125.

menebar benih-benih kebencian dan hal tersebut akan menjelekan citra Islam di mata umum.³⁶

Pada buku biografinya sendiri, Daoed Joesoef juga menyinggung soal pemisahan antara agama dan politik dengan pendidikan. Menurutnya “pendidikan yang berbasis akan nilai-nilai agama tersebut cenderung bersifat provokatif, manipulatif, mudah untuk menebarkan benih-benih kebencian antar sesama umat beragama, fanatisme yang sangat kental dan menimbulkan kemunafikan. Sebagai seorang muslim yang sejati aku berusaha untuk membuat agama Islam menjadi *a religion of reason* bukan menjadi *a religion of hate and fear* seperti yang sudah di tampakan oleh para kelompok-kelompok Islam Garis Keras”. Dengan berkembangnya kelompok-kelompok Islam garis keras tersebut membuat Daoed Joesoef sendiri menolak untuk memberikan izin pendirian Lembaga Bahasa Arab, dan hal tersebut membuat kemarahan yang besar oleh Menteri Agama pada saat itu.³⁷

Kemarahan Menteri Agama pada saat itu juga berlandaskan akan kebijakan yang dikeluarkan oleh Daoed Joesoef sendiri, yang dimana kebijakan tersebut berisikan menyetujui rangkaian kursus-kursus akan bahasa asing yang diadakan oleh beberapa keduataan besar yang ada di Jakarta. Menurut Menteri Agama pada saat itu, sikap yang ditunjukkan oleh Daoed Joesoef sendiri telah mendiskreditkan umat muslim secara

³⁶ Daoed Joesoef, *Emak, Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne* (Jakarta: Kompas, 2005), 261.

³⁷ Daoed Joesoef, *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), 291.

keseluruhan. Padahal di negara Indonesia sendiri mayoritas beragama Islam meski ada sebuah isu-isu akan kebangkitan akan kelompok-kelompok Islam garis keras, bukan berarti seluruh orang ataupun masyarakat di Indonesia yang beragama Islam merupakan bagian dari kelompok-kelompok Islam garis keras tersebut.³⁸

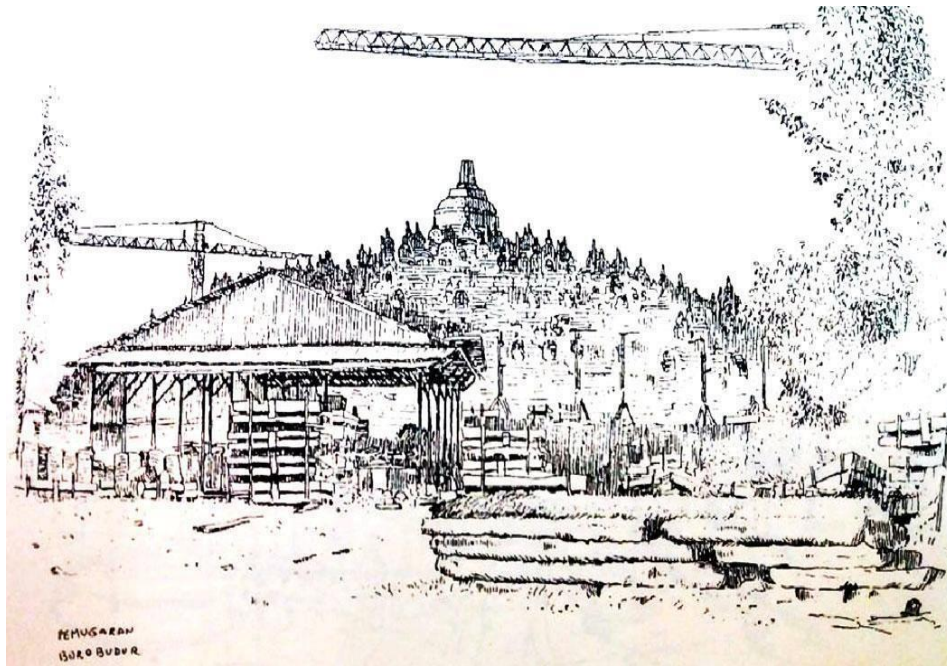
Perhatian Daoed Joesoef dalam dunia kebudayaan pun sudah tidak bisa untuk diragukan lagi, Daoed sendiri telah melihat bahwa ada sebuah hubungan yang cukup erat antara dunia pendidikan dan dunia kebudayaan. Menurutnya, pusat dari kebudayaan adalah lingkungan sekolah yang bermula dari Sekolah Dasar hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas. Sekolah sendiri merupakan pusat kebudayaan yang begitu sangat penting untuk membiasakan kepada peserta didik untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan mengamalkan setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada lingkungan sekolah. Sekolah dianggapnya sebagai bagian dari pusat kebudayaan apabila sekolah tersebut telah mampu untuk menciptakan sebuah habit masyarakat yang gemar belajar, meningkatkan mutu terhadap dunia pendidikan, dan menjadi bentuk yang teladan bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari pusat kebudayaan, sekolah menjadi tumpuan kepada para pengembang logika, etika, estetika dan praktika. Sehubungannya dengan hal tersebut, koteks budaya yang seharusnya

³⁸ Azyumardi Azra, Dkk, *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat "PPIM", 1998), 344.

dikembangkan ketika berada pada lingkungan sekolah antara lain seperti: gemar serta butuh untuk melakukan kegiatan membaca, rajin serta tekun untuk melakukan pembelajaran, suka kan kegiatan penelitian, mendapatkan gairah menulis secara analisis, dan yang lebih penting lagi adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghayatan serta mengamalkan setiap nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, sopan serta santun dalam berkepribadian, mengemban sikap disiplin yang cukup tinggi, dapat menikmati unsur-unsur seni, serta mampu untuk memanfaatkan teknologi.

Jauh sebelum menjabat menjadi seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef sendiri telah melakukan sebuah gebrakan. Gebrakan itu sendiri telah menarik perhatian yang cukup intens pada dunia Internasional terhadap nasib dari bangunan yang juga termasuk kedalam keajaiban yang ada di Dunia, yaitu Candi Borobudur. Sejak Daoed Joesoef menjadi salah satu kandidat untuk menjadi seorang Doktor di Sorbone, Prancis, Daoed sendiri telah menyuarakan begitu keras kepada lembaga dunia yaitu UNESCO tentang betapa pentingnya untuk melakukan rehabilitasi terhadap peninggalan yang bermuatan nilai sejarah tersebut. Lima tahun sebelum menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed sendiri ditunjuk oleh UNESCO untuk merealisasikan dana serta orang yang memegang tanggung jawab atas proyek untuk rehabilitasi terhadap Candi Borobudur.



Gambar 1 2.1 Sketsa Candi Borobudur

Sketsa yang dibuat langsung oleh Daoed Joesoef ketika beliau ditunjuk langsung oleh UNESCO sebagai penanggung jawab untuk kegiatan pemugaran Candi Borobudur. Pada gambar tersebut terlihat Candi Borobudur sedang dilakukan kegiatan pemugaran oleh para kontraktor.³⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Risa Herdahita Putri, *Daoed Joesoef dan Borobudur*, <https://historia.id/kuno/articles/daoed-joesoef-dan-borobudur-vVJaq>. Diakses pada Senin, 1 Agustus 2022 pukul 19:30 Wib.

BAB III

KEBIJAKAN-KENIJAKAN SEKULER PADA MASA PEMERINTAHAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAOED JOESOEF

A. Perubahan Hari Libur Selama Bulan Ramadhan

Dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 pasal 6, Menteri Daoed Joesoef yang isinya adalah menetapkan waktu libur pada saat memasuki bulan Ramadhan atau yang lebih sering dibilang bulan puasa di Indonesia, serta menggantinya sebagai bulan belajar bagi para siswa dan siswi. Pertimbangan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengeluarkan kebijakan tersebut yaitu: *Pertama*, bulan Ramadhan yang setiap tahunnya selalu maju 11 hari, sehingga ketika memasuki bulan Ramadhan dijadikan sebagai hari libur pada setiap tahunnya, maka yang terjadi akan banyak perubahan pada hari-hari sekolah yang dinilai pada waktu tersebut merupakan hari yang efektif untuk dilakukannya kegiatan belajar mengajar.⁴⁰

Pada negeri-negeri Islam seperti Tunisia, Irak, Al-Jazair dan Mesir sekolah-sekolah yang berada disana tidak meliburkan siswa dan siswi pada selama bulan Ramadhan. Oleh karena itu, mengaca dengan negri-negri yang mayoritas Islam tersebut maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mengubah paradigma pendidikan di Indonesia dengan tidak meliburkan sekolah yang ada di Indonesia. Yang *Kedua*, kebiasaan

⁴⁰ Serial Media Dakwah 60, 1979: 12.

mengadakan libur pada saat memasuki bulan Ramadhan berasal dari pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda meliburkan sekolah pada saat bulan Ramadhan tidak lah lain merupakan sebuah upaya pembodohan yang dilakukan oleh pemerintahan Kolonial kepada rakyat Indonesia, sehingga dengan diberlakukannya libur penuh selama bulan Ramadhan menyebabkan anak-anak yang ada di Indonesia menjadi tertinggal dalam menguasai ilmu pengetahuan. Dengan adanya hal tersebut, bangsa Indonesia terus tunduk di bawah kekuasaan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.⁴¹

Selanjutnya yang *Ketiga*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef yang berlandaskan sebuah peristiwa besar bagi umat Islam yaitu sebuah peristiwa yang disebut Nuzulul Qur'an yang terjadi pada setiap 17 bulan Ramadhan, makna dari peristiwa tersebut adalah peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa yang dimana diturunkannya wahyu yang pertama kali oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw yaitu awalan surat Al-Alaq yang memerintahkan kepada seluruh umat manusia terkhusus untuk orang-orang yang beragama Islam untuk membaca dan menulis. Berubahnya sebuah aturan terkait libur sekolah pada bulan puasa menjadikan pada setiap para peserta didik dan para tenaga pengajar untuk terus melakukan proses kegiatan belajar dan mengajar selama berjalannya bulan puasa. Dengan hal tersebut, tujuan tidak meliburkan sekolah secara

⁴¹ Serial Media Dakwah 60, 1979: 13.

penuh pada bulan puasa yaitu untuk melatih para peserta didik untuk melakukan ibadah puasa setidaknya selama dirumah dan di sekolah.⁴²

Dengan adanya kebijakan perubahan hari libur pada bulan Ramadhan tersebut membuat berubahnya waktu libur sekolah pada bulan Ramadhan yang pada mulanya libur pada sebulan penuh menjadi selama 10 hari kerja yang terbagi dalam 3 hari pada awal puasa dan 7 hari pada akhir bulan Ramadhan. Waktu libur sendiri merupakan waktu yang dimana hal tersebut ditiadakannya kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Libur khusus adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan acara peringatan keagamaan, hari peringatan nasional, keadaan umat muslim, waktu panen, karena sesuatu yang disebabkan oleh bencana alam atau adanya keperluan lainnya diluar ketentuan hari tentang libur pada umumnya yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan No. 0211/U/1978. Berkaitan dengan surat keputusan tersebut, maka kegiatan libur pada bulan puasa merupakan kegiatan libur khusus yang diterapkan oleh pemerintah untuk memperingati hari keagamaan.⁴³

Pada waktu liburan sekolah yang merupakan bagian integral dari strategi dan kegiatan pendidikan secara menyeluruh yang berfungsi *Pertama*, sebagai bagian dari waktu jeda sesudah satu periode kegiatan proses belajar mengajar yang ada di sekolah, yang berguna untuk memulihkan tenaga baik itu jasmani ataupun rohani yang dimana hal tersebut digunakan untuk

⁴² Daoed Joesoef, *Dia dan Aku Memoar Pencari Kebenaran* (Jakarta: Kompas, 2006), 689-690.

⁴³ Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah.

menyiapkan diri untuk menghadapi periode kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran yang berikutnya. *Kedua*, sebagai waktu jeda yang digunakan oleh para tenaga pengajar atau guru untuk mengikuti program penataan tahun ajaran yang baru. *Ketiga*, sebagai waktu untuk bentuk penghormatan pada hari-hari besar tertentu bagi pemindaan jiwa sosial, budaya, agama, seni, pengetahuan dan lain-lain. *Keempat*, sebagai waktu yang baik untuk dimanfaatkan oleh para peserta didik sebagai bentuk dari pembinaan pada mental fisik serta pembinaan rekreasi. *Kelima*, sebagai bagian dari waktu beralihnya konsentrasi pendidikan yang berasal dari luar sekolah ke pendidikan dalam lingkungan kekeluargaan serta masyarakat.⁴⁴

Berdasarkan kepada point *ketiga* dan *kelima*, waktu libur pada bulan Ramadhan yang diberlakukan untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan kegiatan ibadah puasa, dengan bentuk pemberian kesempatan kepada umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa dan juga memberikan sebuah kesempatan kepada umat muslim untuk menjalankan hari raya Idul Fitri yang biasanya pada momen tersebut digunakan oleh kebanyakan umat muslim untuk berkumpul dengan keluarga. Akan tetapi, selama hari libur pada bulan Ramadhan beserta hari Raya Idul Fitri bukan berarti anak-anak yang sedang bersekolah lepas dari kegiatan belajar sepenuhnya. Pemerintah sendiri mengharapkan kepada masyarakat yang khususnya para orang tua agar terus untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya.

⁴⁴ Ibid.

Pada waktu libur yang telah tersedia harus tetap dimanfaatkan dengan baik serta secara seefektif mungkin oleh para peserta didik maupun oleh para tenaga pengajar. Bagi para tenaga pengajar waktu libur merupakan sebuah waktu yang bersifat bias, yang dimana -ada waktu tersebut seringkali dimanfaatkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan beserta dengan peningkatan kemampuan terhadap profesi dari masing-masing guru, yang dimana hal tersebut susah untuk didapatkan ketika memasuki waktu kegiatan belajar mengajar, karena pada waktu tersebut mayoritas guru disibukan dengan kegiatan belajar mengajar terhadap para peserta didik. Sedangkan bagi para peserta didik pada waktu libur sendiri bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, kesenian, wisata remaja, kepramukaan, palang merah remaja, pendidikan lalu lintas, pendidikan yang ada di luar sekolah sesuai dengan minat serta bakat yang dimiliki oleh sekelompok siswa dan mahasiswa untuk mengikuti sebuah kegiatan yang bersifat mendidik.⁴⁵

Berkaitan dengan adanya sebuah kebijakan ditiadakannya libur selama bulan Ramadhan secara penuh, maka pada saat bulan puasa setiap sekolah diwajibkan untuk menutup kantin dan para peserta didik non-Muslim dipersilahkan untuk membeli makanan di luar lingkungan sekolah. Di samping hal tersebut, kegiatan-kegiatan para peserta didik selama berada dalam lingkungan sekolah disesuaikan dengan keadaan pada bulan puasa.

⁴⁵ Amalia Solihat, Dkk. "Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran Baru dan Libur Ramadhan." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 55 (Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember) Vol 9, no. 1 (2020): 55.

Misalnya dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang bernuansa terlalu menghabiskan banyak tenaga ataupun keringat yang tergolong banyak mengeluarkan tenaga fisik yang cukup banyak, sementara pada sisi lain jam pelajaran yang berlangsung dikurangi sehingga para siswa yang bersekolah pada sore hari dapat melangsungkan buka puasa di rumah masing-masing.⁴⁶

B. Pelarangan Hijab Bagi Para Siswi Muslim

Pemerintahan pada masa Orde Baru yang dipimpin langsung oleh presiden Soeharto telah berhasil untuk memantapkan posisi kedudukannya dalam pentas politik yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada hubungan antara umat muslim dengan pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu lebih memilih umat muslim sebagai bagian dari ancaman bagi kestabilan politik dan pembangunan. Ketegangan yang terjadi antara pemerintahan Orde Baru dengan umat muslim terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1967 hingga 1980 yang membuat pemerintahan pada saat itu mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang dianggap oleh umat muslim sangat berdampak merugikan.

Dalam kejadian tersebut, umat muslim sendiri menyikapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru ini secara konfrontatif, sehingga membuat hubungan antara pihak pemerintah dengan pihak umat muslim pada saat itu menjadi sangat buruk. Titik balik hubungan antara pemerintah dengan umat muslim ini sendiri mengacu dengan

⁴⁶ Ibid, 55.

digulirkannya Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1982. Adanya gagasan Pancasila sebagai asas tunggal tersebut menimbulkan berbagai macam reaksi terhadap organisasi masyarakat muslim, beberapa dari kalangan ormas muslim menyikapinya dengan berbagai macam reaksi ada beberapa yang pro akan kebijakan tersebut, serta adapula yang kontra dengan kebijakan tersebut. Namun, pada saat itu pihak pemerintahan sendiri benar-benar menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1985, dan mayoritas dari umat muslim sendiri menerimanya serta juga adanya akomodasi antara pihak pemerintahan dengan umat muslim.⁴⁷

Kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru yang membuat berbagai macam reaksi terhadap umat muslim serta menganggapnya sebagai salah satu kebijakan yang kontroversial adalah pelarangan untuk menggunakan jilbab kepada para peserta didik perempuan, kebijakan tersebut juga diterapkan bagi siapapun masyarakat Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan baik dari jenjang Taman Kanak-Kanak atau TK, hingga ke jenjang menengah ke atas. Kebijakan yang dikeluarkan langsung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Orde Baru tersebut tertuang dalam Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang berisikan tentang pedoman mengenai pemakaian seragam secara nasional untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Surat Keputusan No. 52/C/Kep/D.82 memiliki sebuah tujuan

⁴⁷ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 25.

yang berguna untuk menumbuhkan rasa persamaan berdasarkan asas persatuan Indonesia yang juga merupakan salah satu point yang tertuang pada 5 sila dari Pancasila. Selain hal tersebut, dengan adanya penyeragaman seragam sekolah bisa untuk memperkecil, bahkan dapat bisa menghilangkan perbedaan yang ada di Indonesia yang merupakan negara yang majemuk berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, karena dalam pemakaian seragam dapat untuk menghilangkan sikap eksklusif yang ada pada para peserta didik.⁴⁸

Pemahaman akan bentuk keislaman yang didapatkan oleh para pelajar diperoleh ketika mereka telah mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurus rohani Islam yang dimana bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang ada pada setiap sekolah. Ketika para siswa mengikuti rangkaian kegiatan tersebut mereka akan diberikan sebuah pelatihan mengenai materi-materi tentang keagamaan seperti mengenal Allah SWT, mengenal Nabi Muhammad Saw dan mengenai seluk beluk dari Al-Qur'an. Selain melakukan pelatihan tentang hal tersebut, para siswa juga diberikan materi mengenai bagaimana caranya untuk memecahkan sebuah masalah yang sudah disampaikan oleh instruktur, instruktur tersebut biasanya dari kalangan mahasiswa yang berbasis Islam, guru agama, dan alumni dari sekolah tersebut.

⁴⁸ Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 052/C/Kep/D.82 tentang pedoman pakaian seragam sekolah siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bagi seorang pelajar perempuan yang memilih untuk menggunakan jilbab ketika memasuki proses belajar mengajar yang ada di sekolah, pada akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan ketika pihak pemerintah sendiri mengeluarkan Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82, sehingga membuat pakaian yang dikenakan oleh siswa perempuan yang menggunakan jilbab yang mereka kenakan melanggar peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, karena hal tersebut tidak lah seragam dengan para siswa yang lainya. Ketika pemerintah mengimplementasikan akan hal tersebut, pada pihak sekolah sendiri tampaknya juga seolah mengabaikan hak para pelajar perempuan untuk menggunakan jilbab. Para pelajar perempuan yang menggunakan jilbab tersebut berposisi dilematis, disisi lain mereka dituntut oleh pihak sekolah untuk menggunakan seragam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di sisi lainya mereka juga harus dituntut untuk menutup aurat sesuai dengan ajaran agama Islam yang sudah di Imani oleh mereka. Hal tersebut menimbulkan sikap kegaduhan antara masyarakat, penolakan akan para pelajar perempuan yang menggunakan jilbab yang mengakibatkan persoalan akan hukum jilbab mencuat ke permukaan dan hal tersebut menjadi berkembang secara luas seiring dengan pemberitaan dari surat kabar secara masif.⁴⁹

Namun pada akhirnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto bersikap lunak terhadap umat muslim yang ditandai

⁴⁹ Salsabila Ramadhani. "Kebijakan Jilbab di SMA Pada Masa Daed Joesoef (Penerapan Di Surabaya Tahun 1982-1991)," *Avatara*, e-Journal Pendidikan dan Sejarah (Jurusan Pendidikan dan Sejarah Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya) Vol, 6. No, 2. 2018, 367.

dengan pembuatan Surat Keputusan yang baru dengan menghapus aturan pelarangan para siswi-siswi untuk menggunakan jilbab pada tahun 1991. Dalam Surat Keputusan No. 100/C/Kep/D/1991, tidak ada kalimat yang menggunakan kosa kata jilbab, namun yang digunakan ialah istilah kata “seragam khas”. Bunyi kalimat tersebut terdapat pada BAB IV tentang jenis, macam dan bentuk yang termuat ke dalam pasal 5 nomor 4 yang berbunyi “Bagi sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA yang berhubungan dengan pertimbangan agama dan adat istiadat setempat untuk menghendaki macam dan bentuk yang berbeda-beda, terutama untuk jenis pakaian yang digunakan oleh siswa putri, maka dapat untuk memakai pakaian seragam khas untuk seluruh siswa dalam satu sekolah, perbedaan tersebut terletak pada: tutup kepala khas, ukuran panjang lengan blus, dan ukuran panjang rok”.⁵⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁰ Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 100/c/Kep/D/1991 tentang pedoman pakaian seragam siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas.

BAB IV

DAMPAK BAGI UMAT ISLAM ATAS KEBIJAKAN SEKULER MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAOED JOESOEF

A. Dampak Dari Kebijakan Libur Pada Bulan Ramadhan

Menurut pimpinan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama yakni K.H. Saifudin Zuhri yang beranggapan bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan tersebut memang tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran dari agama Islam. Akan tetapi, menurut dari beliau sendiri dengan adanya kebijakan tersebut orang akan lupa jika kegiatan libur selama Ramadhan itu membawa dampak sebuah hal yang positif bagi orang-orang yang termasuk dalam civitas akademik seperti guru dan murid, dengan adanya hal tersebut sebagai bentuk pengupayakan peningkatan mutu terhadap pendidikan. Begitupun tokoh muslim lainnya seperti ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI yaitu Buya Hamka yang mengatakan bahwa kebijakan itu sendiri menjadi bagian dari cobaan yang serius bagi orang-orang yang beragama muslim.⁵¹

Menurut dari kalangan golongan para alim ulama kemerdekaan bangsa sejak awal telah didasarkan berdasarkan dari nilai-nilai Islam. Libur sekolah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan telah berlangsung cukup lama, bahkan hal tersebut tetap berlangsung dalam masa kolonialisme Hindia Belanda. Orang-orang Belanda yang dinilai orang-orang Indonesia sebagai penjajah dianggap lebih menghormati umat Islam dengan melakukan

⁵¹ Mujibburahman, *Pembaharuan dan Pemikiran Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 238.

kegiatan libur belajar mengajar selama satu bulan penuh, sehingga anak-anak yang beragama Islam yang dalam hal ini masih pada lingkungan pondok pesantren memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kegiatan beribadah pada bulan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagian dari kalangan ulama yang memiliki pondok pesantren berpandangan bahwa Daoed Joesoef telah terbius akan budaya Barat. Konsep dari pendidikan yang dilaksanakan oleh negara-negara Barat telah membuatnya lupa akan nilai-nilai murni terhadap keislaman, sehingga Daod Joesoef sendiri sangat terlalu mengagung-agungkan akan ilmu keduniawian bukan lagi ilmu keagamaan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef yang menghapuskan libur pada bulan Ramadhan dinilai bukan saja meresahkan bagi umat Islam, tetapi juga hal tersebut mengguncangkan dan mengecewakan terhadap seluruh umat Islam di Indonesia. Pada era kepemimpinan Orde Baru protes-protes yang dilangsungkan dalam bentuk unjuk rasa sangatlah dilarang oleh pemerintahan Orde Baru, sehingga pada pihak masyarakat sendiri sudah tidak memiliki sebuah akses untuk melangsungkan kegiatan tatap muka dengan menteri Pendidikan dan Kebudayaan bapak Daoed Joesoef. Oleh karena itu, kalangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan para politikus

merupakan dua organisasi yang menyuarakan aspirasi dan kekecewaan yang telah dialami oleh umat Islam pada saat keluarnya kebijakan tersebut.⁵²

Menurut pandangan dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI tersebut, Daoed Joesoef sangat kurang untuk menghargai atas saran-saran dan berbagai macam pertimbangan yang sudah diberitahukan oleh Majelis Ulama Indonesia kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dikarenakan salah satu tugas pokok dari Majelis Ulama Indonesia sendiri adalah memberikan sebuah nasehat dan pertimbangan pada *zu'ama*. Dikarenakan hal tersebut, pihak dari Majelis Ulama Indonesia merasakan kekecewaan. Menurut mereka, meskipun sekolah diliburkan pada saat bulan Ramadhan bukan berarti murid-murid yang masih berada di bangku persekolahan tidak melaksanakan kegiatan belajar sama sekali, bahkan sebagian dari mereka telah banyak ikut kegiatan mengaji, ikut pendidikan diniyah, ikut pondok pesantren dan lain sebagainya. Kegiatan belajar mengajar selama jalannya bulan Ramadhan serta kenyataan yang ada di lapangan tidak seperti apa yang sudah diperkirakan oleh menteri Daoed Joesoef.⁵³

Kritik atas kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri Daoed Joesoef mengenai sebuah aturan yang mengatur tentang kegiatan libur sekolah selama bulan Ramadhan juga dilontarkan oleh ketua umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yaitu Muhammad Nashir. Beliau sendiri menilai bahwa

⁵² Marwan Saridjo, *Tragedi Daoed Joesoef: Catatan Atas Otobiografi "Dia dan Aku"* (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani, 2007), 73-74.

⁵³ *Ibid*, 67.

kebijakan tersebut sangatlah bertentangan dengan undang-undang, dan tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja bahkan menurut Nashir kebijakan tersebut juga telah melukai hari umat Islam yang ada di Indonesia. Sikap dari menteri Daoed Joesoef sendiri yang cenderung melakukan deskrisminasi terhadap umat Islam, hal ini membuat Daoed Joesoef sendiri telah dinilai sebagai bagian orang yang secular. Sikap tersebut sendiri dikaitkan dengan jejak pendidikannya yang pernah menimba ilmu di Universitas Sorbonne, Prancis, dan menurut Nashir Daoed Joesoef dinilai telah terbius oleh kagungan kebudayaan Barat.

Muhammad Nashir sendiri merupakan salah satu tokoh yang telah menilai bahwasanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh menteri Daoed Joesoef merupakan sebuah langkah pertama yang membawa polarisasi terhadap bangsa menjadi menonjol ke arah sekularisasi, dikarenakan menurut Nashir orang-orang yang berideologi sekuler telah beranggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan agama akan dianggapnya sebuah penghambat bagi kemajuan dunia. Menurut Nashir, sekularisme pada dasarnya adalah sebuah usaha untuk memisahkan antara agama dengan bidang-bidang yang lainya seperti bidang politik, ilmu pengetahuan, ekonomi dan lain sebagainya. Sekularisme sendiri telah menganggap agama menjadi sebuah hal yang dianggap kabur dan tidak ada dalam kenyataan kehidupan di dunia. Oleh karena itu, sekularisme haruslah diawasi dengan seketat mungkin agar sebuah ideologi yang bermuatan dengan nilai-nilai

secular tidak menjadi sebuah ideologi sebuah lembaga, khususnya lembaga negara.⁵⁴

Perubahan terhadap sebuah aturan mengenai tentang libur pada bulan Ramadhan dianggap oleh beberapa pihak dari kalangan ulama sampai dengan akademisi Islam sebagai bagian dari upaya sekularisasi. Sedangkan menurut pemerintahan sendiri, selama masih ada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tidak mungkin terjadi adanya sebuah proses sekularisasi yang ada di Republik Indonesia. Meskipun menurut pemerintahan sendiri berpandangan dengan sedemikian rupa, namun pihak lainnya tetap beranggapan bahwa selalu ada sebuah kemungkinan bahwa bangsa ini akan terjerumus pada sekularisasi, jika kita sendiri sebagai bagian dari anak bangsa tidak selalu untuk berwaspada. Sedangkan pada pidak menteri Daoed Joesoef sendiri tetap konsisten untuk mengambil sebuah keputusan tersebut, meski keputasannya atas kebijakan yang dikeluarkannya banyak tentangan dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu, meski kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri Daoed Joesoef tidak memuaskan pihak-pihak yang tetap teguh pada nilai-nilai yang bermuatan dengan agama Islam, beliau sendiri tetap untuk bersikukuh untuk tetap meneruskan kebijakan tersebut, meski kondisi politik, ekonomi dan kepribadian dari Daoed Joesoef turut mewarnai terbitnya pelaksanaan Surat Keputusan No. 0211/U/1978.

⁵⁴ Serial Media Dakwah 62, 1979, 27-34.

Dalam adanya hal tersebut, maka dengan keluarnya kebijakan yang dinilai telah mendiskriminasi umat Islam membuat hubungan antara pemerintah dengan umat Islam pada masa rezim Orde Baru sendiri kian memburuk. Menurut Sri Martini yang tertuang dalam tulisan tesisnya yang berjudul “Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Sebuah Politik Pemerintahan Orde Baru Terhadap Pakaian Seragam Sekolah 1982-1991” yang telah menuliskan bahwa hubungan antara pemerintahan Orde Baru dengan umat Islam pada saat itu merupakan hubungan yang bersifat antagonistik. Hubungan antagonistik ini sendiri merupakan sebuah hubungan yang bersifat saling mencurigai antara kekuatan dari masing-masing kubu, baik dari sisi pemerintahan rezim Orde Baru, dengan sisi umat Islam itu sendiri. Sementara, sikap yang saling mencurigai tersebut juga telah terlihat dengan jelas dari berbagai macam pendapat yang sudah disampaikan oleh sebagian tokoh dari umat Islam yang terdiri dari kalangan ulama hingga akademisi Islam dan juga pandangan dari Daoed Joesoef sendiri yang pada saat itu menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan.⁵⁵

B. Dampak Dari Kebijakan Pelarangan Berjilbab Bagi Umat Muslim

Maraknya pemakaian jilbab yang digunakan oleh para peserta didik perempuan yang ada di sekolah-sekolah yang disebabkan oleh adanya berbagai macam gerakan-gerakan dakwah yang dianggap sebagai bagian dari bentuk wujud fisik dari gerakan politik yang berlandaskan agama Islam,

⁵⁵ Sri Martini, *Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Sebuah Politik Pemerintahan Orde Baru Terhadap pakaian Seragam Sekolah 1982-1991*, Tesis, (Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2003), 32.

yang dimana gerakan-gerakan tersebut sangatlah bertentangan dengan pemerintahan rezim Orde Baru yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, Sehingga tidak heran jika pada kemudian hari terjadi sebuah perselisihan yang terjadi antara pihak pelajar yang menggunakan jilbab dengan pemerintah rezim Orde Baru. Pada masa tersebut, pemerintahan sendiri sering kali menaggap Islam sebagai bagian dari ancaman yang sangat serius, mereka sangat berusaha dengan keras untuk melakukan berbagai macam cara guna untuk membatasi dan menghalangi pergerakan umat Islam, yang dimana salah satunya adalah dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai pemakaian seragam sekolah secara nasional dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 052?C/Kep/D.1982 yang diberlakukan pada tanggal 17 Maret 1982.⁵⁶

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka sontak menimbulkan berbagai macam tantangan serta perjuangan yang dilakukan oleh para pelajar pada saat itu, meskipun isi dari Surat Keputusan No 052 tersebut tidak serta merta menyatakan secara langsung upaya pelarangan penggunaan jilbab, akan tetapi kebijakan tersebut telah menunjukkan bentuk larangan pemakaian jilbab pada sekolah-sekolah yang berstatus negeri. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, sehari setelahnya langsung mencuat kepermukaan. Sejumlah sekolah-sekolah negeri sendiri langsung melakukan tindakan yang cukup tegas terhadap para pelajar perempuan

⁵⁶ Alwi Alatas, *Revolusi Jilbab Kasus Pelanggaran Jilbab di SMA Negeri Se Jabodetabek 1982-1991* (Jakarta: Al-I'Tishom Cahaya Umat, 2001), 12.

yang menggunakan jilbab ketika bersekolah dengan tidak diperbolehkan untuk memasuki halaman sekolah, serta para siswa tersebut juga akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, dan juga diberikan surat yang digunakan untuk disampaikan kepada wali murid. Tidak hanya hal tersebut saja, upaya penekanan yang dilakukan oleh para guru-guru untuk tidak menerima para pelajar yang sedang menggunakan jilbab untuk bisa belajar di kelas atau mereka akan diberikan sanksi yang cukup tegas dengan dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah-sekolah yang berstatus swasta.⁵⁷

Sebagai bagian dari sebuah contoh kasus yang ada pada kota Surabaya yang dimana kasus mengenai pelarangan untuk menggunakan jilbab ketika berada pada lingkungan sekolah ini juga muncul kepermukaan publik. Kota Surabaya sendiri merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia, terbesar kedua setelah Ibu Kota Jakarta. Yang dimana, Kota Surabaya sendiri juga merupakan sebuah kota yang perkembangannya dilakukan sebagai pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitar. Oleh karena itu, Kota Surabaya juga merupakan sebuah kota rujukan bagi siswa yang sedang menempuh pendidikan. Ribuan siswa dan mahasiswa dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia sedang mengenyam pendidikan di Kota Surabaya. Terdapat berbagai macam tingkat pendidikan yang ada pada Kota Surabaya itu sendiri, mulai dari pendidikan anak usia dini, hingga pendidikan tinggi seperti akademi, institute, politeknik, sekolah tinggi

⁵⁷ Leni Nuraeni, "Pelarangan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991" *Al-Tsaqafah: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati)* Vol. 18, No. 2, 2021, 169.

hingga universitas. Oleh karena itu tidak heran jika kasus pelarangan untuk menggunakan jilbab juga ikut menggejarkan masyarakat yang mendiami Kota Surabaya.

Meski penggunaan jilbab yang dilakukan oleh para pelajar perempuan tidak akan menghalangi prestasi maupun aktivitas belajar selama berada pada lingkungan sekolah. Akan tetapi, beberapa guru tidak akan mau untuk mengajar apabila pada suatu kelas masih terdapat para pelajar perempuan yang menggunakan jilbab. Oleh karena itu, para guru sendiri akan memberikan sebuah pilihan kepada siswa yang masih menggunakan jilbabnya ketika berada di kelas untuk melepas jilbabnya atau dikeluarkan dari kelas, dan jika masih tidak mau untuk melepaskan jilbabnya maka sang guru lah yang akan keluar dari kelas dan tidak akan mau untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut kompak dilakukan oleh para guru-guru yang ada pada kawasan sekolah kompleks yang ada di Surabaya, karena hal tersebut merupakan sebuah intruksi langsung dari kepala sekolah, sedangkan para kepala sekolah sendiri hanya tunduk pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku yang membuat kebijakan.⁵⁸

Intruksi langsung oleh kepala wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri untuk mengharuskan bagi para guru-guru yang berada pada lingkungan sekolah negeri untuk melakukan sebuah tekanan-tekanan dengan serta merta menggunakan sebuah nada yang bersifat

⁵⁸ Wawancara, Hayatun, 21 Agustus 2022.

ancaman bagi para siswa yang masih menggunakan jilbab. Suka ataupun tidak suka, para guru-guru tersebut haruslah untuk menjalankan sebuah intruksi tersebut, karena mereka sendiri juga akan mendapatkan tekanan langsung oleh para kepala sekolah apabila tidak menjalankan tugas dengan sebagaimana fungsinya. Sementara pada pihak sekolah sendiri juga melakukan tindakan dengan cara persuasif kepada para siswa yang masih menggunakan jilbab, upaya tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan para siswa yang masih menggunakan jilbab untuk dikumpulkan dan diserahkan kepada Bimbingan Konseling guna untuk diberikan nasihat kepada mereka yang masih menggunakan jilbab dengan berkata “kalian harus mementingkan pendidikan terlebih dahulu, meskipun menggunakan jilbab sendiri merupakan sebuah kewajiban bagi seorang Muslimah ketika memasuki akhir baligh”, meski para guru Bimbingan Konseling tersebut menasihati dengan cara yang lembut hingga sampai menangis, namun hal tersebut juga tidak membuat para pelajar yang masih menggunakan jilbab tertegun hatinya melihat tangisan sang guru untuk melepas jilbabnya, sementara mereka sendiri masih dengan akan imannya.

Sementara itu, pada pihak Lembaga Bantuan Hukum Surabaya yang pada saat itu menerima kedatangan tamu-tamunya yakni para siswi-siswi yang memakai jilbab ketika berada pada lingkungan sekolah dan pihak LBH sendiri sedang mengupayakan untuk menangani kasus tersebut dengan sebaik mungkin. Pada tataran langkah selanjutnya, pihak Lembaga Bantuan Hukum sendiri telah mencoba untuk mendatangkan para orang tua dari

siswi-siswi berhijab untuk diajak bermusyawarah terhadap penyelesaian kasus tersebut. Kemudian para siswi-siswi tersebut dikelompokkan dan dihadapkan kepada wartawan yang telah hadir guna mengemukakan berbagai macam perlakuan dari sekolah yang telah mereka alami sendiri atas sehubungan dengan pemakaian jilbab yang mereka gunakan. Hasilnya, beberapa diantara mereka dilarang untuk mengikuti pelajaran dan apabila para siswi tersebut ngotot untuk memasuki kelas, maka guru-guru tersebut tidak akan memasuki kelas apabila masih kedaoatan ada seorang siswi yang sedang menggunakan jilbab ketika berada di kelas.⁵⁹

Dampak yang mereka alami sendiri adalah seringkali mereka mendapatkan berbagai macam aksi terror seperti sering sekali dipanggil ke kantor kepala sekolah saat sedang mengikuti pelajaran, atau harus dipaksakan untuk pulang secara tiba-tiba. Mereka sendiri juga dilarang untuk menggunakan jilbab pada acara non formal seperti kegiatan pariwisata dan kegiatan ekstrakurikuler, selain hal tersebut ada juga guru yang tak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi kepada muridnya yang masih menggunakan jilbab dengan memberikan nilai D pada rapor mereka, sehingga dengan adanya hal tersebut membuat prestasi yang dialami oleh siswi-siswi tersebut menjadi merosot.⁶⁰

Selanjutnya, dalam lingkup pergaulan antara para siswa dan siswi yang ada disekolahan, dengan adanya kasus tersebut membuat lingkup dari para

⁵⁹ Surabaya Post, 18 Januari 1991, "*Siswi Berjilbab Datangi LBH Karena Masih Dilarang Untuk Masuk Kelas*".

⁶⁰ Ibid.

siswi yang menggunakan jilbab cenderung bersifat sangat eksklusif pada saat berada dalam lingkungan sekolah. Karena para siswi yang menggunakan jilbab hanya ingin berteman dengan sesama mereka yang juga menggunakan jilbab, namun beberapa siswi masih ada yang memiliki grup ataupun kelompok pertemanan di luar siswi yang memakai jilbab. Tidak hanya itu saja, perlakuan diskriminasi terhadap siswi yang memakai jilbab sendiri terus berlanjut sampai dengan dikeluarkannya surat dari sekolah yang bertuliskan bahwa siswi tersebut telah dikeluarkan dari sekolah karena masih kedapatan menggunakan jilbab, namun surat tersebut tak sampai kepada orang tua atau wali murid itu sendiri karena takut apabila mereka dikeluarkan dari sekolah karena masalah jilbab, tentunya pada pihak orang tua sendiri jika mengetahuinya maka akan memaksakan kepada anaknya untuk melepaskan jilbabnya. Hal ini didasari oleh pihak orang tua dikarenakan sulitnya mencari sekolah yang tergolong bagus dan jika terpaksa pindah sekolah tentunya memerlukan biaya yang tidak murah.⁶¹

Menanggapi terkait berbagai macam kasus mengenai siswi yang menggunakan jilbab, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai busana yang dikenakan oleh muslimah adalah wajib hukumnya serta mengharapakan kepada pemerintah sendiri untuk memberikan sebuah perlindungan kepada siswi-siswi yang menggunakan jilbab, fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 1983. Setelah mengeluarkan fatwa tersebut, pihak dari Majelis Ulama Indonesia kemudian mengirimkan surat

⁶¹ Jawa Pos, 21 Februari 1991, "*Mantan Siswi Berjilbab Tak Bisa Kembali Lagi ke Sekolah*".

kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang menggantikan Daoed Joesoef. Surat tersebut dikirim dengan latar belakang adanya sebuah informasi yang telah berkembang tentang permasalahan terhadap siswi yang menggunakan jilbab.⁶²

Sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia, pihak dari Muhammadiyah juga melakukan sebuah tindakan untuk mengentaskan permasalahan jilbab itu sendiri. Oleh karena itu, pihak Muhammadiyah sendiri juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar diberikan waktu untuk melakukan silaturahmi antara utusan Muhammadiyah dengan beberapa menteri yang terkait dengan adanya kebijakan tersebut.⁶³ Menurut hasil dari rapat mengenai pedoman busana yang digunakan ketika bersekolah, Muhammadiyah berpendapat bahwa penerapan terkait peraturan pakaian seragam sekolah haruslah sesuai dengan sifat dari masyarakat Indonesia yang majemuk, serta berlandaskan dengan demokrasi Pancasila. Busana kerudung atau jilbab bagi para siswi-siswi yang beragama Islam hendaklah tidak dipermasalahkan, apalagi hal tersebut telah menyangkut ajaran agama tertentu.

Selanjutnya, dari pihak Muhammadiyah sendiri selain mengirimkan surat kepada menteri Pendidikan dan Kebudayaan guna untuk menyelesaikan masalah jilbab yang tidak kunjung usai, selepas itu Muhammadiyah juga melakukan tindakan yang nyata dengan bersedia

⁶² Alwi Alatas, *Revolusi Jilbab Kasus Pelanggaran Jilbab di SMA Negeri Se Jabodetabek 1982-1991* (Jakarta: Al-I'Tishom Cahaya Umat, 2001), 15.

⁶³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 16 Juni 1983, No. A/6-1302/1983.

untuk menampung sebanyak dua ratus siswi yang menggunakan jilbab, baik siswi tersebut pindah atas kemauannya sendiri maupun yang telah dikeluarkan oleh sekolah. Untuk menampung para siswi-siswi yang menggunakan jilbab tersebut, Muhammadiyah sendiri telah menyiapkan beberapa kelas kosong yang dipergunakan untuk para siswi-siswi tersebut agar mereka bisa untuk melanjutkan sekolahnya dan tidak mengalami putus sekolah hanya karena mereka sedang menggunakan jilbab pada saat berlangsungnya pelajaran dikelas, dimana hal itu sangatlah merugikan bagi siswi tersebut.⁶⁴

Pada tanggal 26 Februari 1991 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi untuk mengakhiri polemik tentang masalah penggunaan jilbab ketika berada pada lingkungan sekolah. Polemik tersebut diakhiri dengan direvisinya Surat Keputusan No. 42/C/Kep/D/1982 tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 100/C/Kep/D/1991, dimana pakaian jilbab atau kerudung diistilahkan sebagai pakaian seragam khas. Penggunaan kata seragam khas dikarenakan atas keyakinan terhadap diri sendiri atau pribadi, bukan berlandaskan pertimbangan agama, adat istiadat yang merupakan sebuah istilah pada Surat Keputusan yang lama. Setelah resmi dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru tersebut, pada akhirnya banyak siswi-siswi secara bertahap menggunakan jilbab, bahkan hingga masa sekarang ini hampir semua siswi yang ada pada sekolahan negeri yang

⁶⁴ Tempo No. 24, Tahun XV, 10 Agustus 1985, "*Akhirnya Pemakai Kerudung Pindah Sekolah*", 69.

beragama Islam rata-rata mereka semua menggunakan jilbab, serta sudah jarang sekali sekolahan yang murid-muridnya tidak menggunakan jilbab, tentu hal ini sangatlah berbeda yang dahulunya sampai dilarang-larang kini malah menjadi sebuah trend yang positif bagi anak-anak yang masih mengenyam pendidikan di sekolahan.⁶⁵



⁶⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Keputusan No. 100/C/Kep/D/1991 tentang "Pedoman Pakaian Seragam Sekolah"

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa bab yang sebelumnya di bahas pada penulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Daoed Joesoef lahir di Medan pada tanggal 8 Agustus 1926, merupakan seorang anak keempat dari lima bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Moehammad Joesoef dan Siti Djasi'ah yang berasal dari Jeron, Benteng, Yogyakarta. Daoed Joesoef merupakan seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kabinet pembangunan III di dalam kekuasaan rezim Orde Baru. Daoed Joesoef mengawali bangku sekolah di *Holland Inlandsche School* di Medan, kemudian beliau melanjutkan studinya di *Meer Uitgebried Lager Onderwijs* atau MULO, setelah itu beliau memasuki dunia militer dan dipindahkan ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta beliau melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setelah memperoleh gelar sarjananya, beliau menyudahi kiprahnya pada dunia militer, lalu kemudian beliau melanjutkan studinya untuk merampungkan gelar doktoral di Universitas Sorbonne, Prancis. Setelah merampungkan studinya di Prancis, Daoed Joesoef masih aktif dalam dunia pendidikan dengan menjadi dosen sekaligus menjabat sebagai dekan di Universitas Indonesia, hingga mendapatkan undangan dari keluarga Cendana

untuk dijadikan sebagai seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan III rezim Orde Baru.

2. Selama menjabat sebagai seorang menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef seringkali membuat beberapa kebijakan yang cukup kontroversial, tidak hanya itu beberapa kebijakan yang dikeluarkannya dianggap sangat merugikan bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Seperti kebijakan No. 0211/U/1978 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berisikan tentang peniadaan libur sekolah pada bulan Ramadhan. Tidak hanya itu saja selang beberapa tahun kemudian, Daoed Joesoef juga mengeluarkan kebijakan No. 052/C/Kep/D.82 yang berisikan tentang pelarangan penggunaan jilbab kepada siswi-siswi selama mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Setelah itu, beliau juga mengusulkan untuk ditiadakannya pelajaran Agama pada setiap sekolah negeri yang ada di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut membuat Daoed Joesoef dinilai telah menyebarkan Sekularisasi dalam dunia pendidikan.

3. Dampaknya ketika Daoed Joesoef mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang dinilai sekuler tersebut adalah berbagai macam kritikan yang dilayangkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada khususnya. Kritikan yang datang dari berbagai macam lembaga serta beberapa organisasi masyarakat yang ada di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah,

Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah Islam Indonesia dan lain sebagainya. Selain itu, sejumlah siswi-siswi yang sedang memakai jilbab ketika bersekolah di sekolah yang bernaungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga terkena dampak, mereka sering mengalami tindakan diskriminasi dan teror untuk tidak lagi memakai jilbab di sekolah, bahkan beberapa diantara mereka yang sampai dikeluarkan dari sekolah karena masih ngotot untuk memakai jilbab. Pada momen tersebut maka yang dirugikan adalah para wali murid, karena ketika anaknya dikeluarkan dari sekolah, maka otomatis para wali murid akan mencari sekolah yang baru, yang tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak murah.

B. Saran

Setelah menyelesaikan sebuah penelitian yang terkait dengan sekularisasi kebijakan pendidikan yang ada pada masa menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef, maka kritik dan saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Penulis berfokus pada pembahasan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saat itu dipimpin oleh Daoed Joesoef yang dinilai sekuler dan merugikan bagi umat Islam. Maka, saran saya pada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian atau mendalami lebih jauh tentang sebuah persoalan yang sama serta dengan sub bab yang berbeda.

2. Kepada Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel untuk melakukan sebuah penelitian yang belum diteliti ataupun belum terjawab atas berbagai macam persoalan-persoalan yang ada.
3. Penulisan yang sudah diselesaikan ini, ternyata masih banyak sekali kekurangan, baik dalam aspek kepenulisan, isi, data atau sumber informasi yang masih belum terinci. Atas dasar tersebut, penulis memberikan dukungan kepada peneliti berikutnya untuk lebih memaksimalkan usaha yang sudah di lakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Artikel:

Serial Media Dakwah 60 (1979).

Serial Media Dakwah 62 (1979).

"Akhirnya Pemakai Kerudung Pindah Sekolah." (*Tempo* Tahun XV) 24 (Agustus 1985).

"Mantan Siswi Berjilbab Tak Bisa Kembali Lagi Ke Sekolah." (*Jawa Pos*) Februari 1991.

"Siswi Berjilbab Datangi LBH Karena Masih Dilarang Untuk Masuk Kelas." (*Surabaya Post*) Januari 1991.

Putri, Risa Herdahita. "Daoed Joesoef dan Borobudur." (*Historia*) n.d.

Jurnal:

Amalia Solihat, Dkk. "Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran Baru dan Libur Ramadhan." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 55 (Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember) 9, no. 1 (2020): 55.

Ismail, M. Syukri. "Kritik Terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Al Qardhawi)." *Kontekstualita* (STAI YASNI Muara Bungo) 29, no. 1 (2014): 107.

Nuraeni, Leni. "Pelarangan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991." *Al-Tsaqafah: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati) 18, no. 2 (2021): 169.

Ramadhani, Salsabila. "Kebijakan Jilbab di SMA Pada Masa Daoed Joesoef (Penerapan Di Surabaya Tahun 1982-1991)." *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* (Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya) 6, no. 2 (2018): 367.

Wahyono, Hari. "Makna dan Fungsi Teori Dalam Proses Berfikir ilmiah dan Dalam Proses Penelitian Bahasa." (*FKIP Universitas Tidar Magelang*) 23, no. 1 (n.d.): 203-211.

Undang-Undang:

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 Tentang Tahun Ajaran Sekolah.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 052/C/Kep/D.82 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Lingkungan Pembinaan Deriktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Surat Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 100/C/Kep/D/1991 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Siswa, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Wawancara:

Hayatun, Guru Sejarah SMA Negeri 4 Surabaya Pada Tahun 1988-1990. Usia 65 Tahun, 21 Agustus 2022.

Buku:

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Alatas, Alwi. *Revolusi Jilbab Kasus Pelanggaran Jilbab di SMA Negeri se Jabodetabek 1982-1991*. Jakarta: Al-ITishom Cahaya Umat, 2001.

Al-Attas, Syed Muhammad Al-Naquib. *Islam dan Sekularisme*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1981.

Asnan, Gusti. *Biografi Tujuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia "Disiapkan Dalam Rangka Penulisan Buku Sejarah Tokoh Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia "*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

Azyumardi Azra, Dkk. *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998.

Bambang Margono, Dkk. *Pembaharuan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Inti Ilmu, 2003.

Dunn, William N. *Public Policy Analysis : An Introduction Terj. ISIPOL*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

Effendy, Bachtiar. *Teologi Politik Baru Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Fellard, Andree. *NU vis-a-vis Negara: Pencarisan Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LkiS, 1999.

Husaini, Adian. *Islam Liberal*. Jakarta: Gema Insane Press, 2008.

Joesoef, Daoed. *Dia dan Aku Memoar Pencari Kebenaran*. Jakarta: Kompas, 2006.

- . *Emak, Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne*. Jakarta: Kompas, 2005.
- . *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017.
- Kurniawan, Deka. *Melengserkan Agama Dari Urusan Publik*. Surabaya: Hidayatullah Press, 2005.
- Martini, Sri. *Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Sebuah Politik Pemerintahan Orde Baru Terhadap Pakaian Seragam Sekolah 1982-1991*. Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2003.
- Mujiburrahman. *Pembaharuan dan Pemikiran Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Notosusanto, Nugroho. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu, 1978.
- Polomo, Margareth M. *Sosiologi Kontemporer, Terj. Yasogama*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Retnoningsih, Suharno dan Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2002.
- S. Sumardi, Dkk. *Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat: Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.
- Said, Salim Haji. *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Bandung : Mizan, 2016.
- Saridjo, Marwan. *Tragedi Daoed Joesoef: Catatan Atas Biografi "Dia dan Aku"*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- West, Richard. *Pengantar Teori Komunikasi Analisa dan Aplikasi Edisi ke 3*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Yuliantri, Sardiman dan. *Dinamika Pendidikan Masa Orde Baru (Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef dan Nugroho Notosuseno)*. Yogyakarta: FIS Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.